



**RENCANA STRATEGIS 2017 - 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyusun Renstra tahun 2017–2022, yang merupakan dokumen perencanaan untuk mengarahkan pelayanan Dinas Lingkungan khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur terpilih periode 2017–2022 untuk urusan lingkungan hidup. Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang diuraikan secara detil dalam strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Rencana Strategis yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun. Kiranya Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan

Jakarta, 2018

Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi DKI Jakarta



Drs. H. Isnawa Adji, M.AP
NIP 197205241992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iv	
DAFTAR GAMBAR	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Tulisan	3
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DLH PROVINSI DKI JAKARTA	5
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
	2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	13
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	18
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	29
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	31
	3.1. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	31
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	33
	3.3. Telaahan Renstra KLHK	37
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	41
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	44
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	50
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LH	62
BAB VIII	PENUTUP	63

LAMPIRAN TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN RENSTRA TAHUN 2017-2022

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Tenaga PJLP	15
Tabel II.2	Data Kendaraan Angkutan Sampah	16
Tabel II.3	Data Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup	17
Tabel II.4	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta	22
Tabel II.5	Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk berdasarkan Indeks Pencemar	22
Tabel II.6	Status Mutu Pemantauan Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemar	23
Tabel II.7	Status Mutu Pemantauan Air Tanah berdasarkan Indeks Pencemar	23
Tabel II.8	Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemar	24
Tabel II.9	Status Mutu Pemantauan Perairan Muara Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemar	24
Tabel II.10	Pengawasan Terhadap Implementasi Amdal dan UKL/UPL	25
Tabel II.11	Data Penegakan Hukum Lingkungan	26
Tabel II.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	27
Tabel II.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	28
Tabel III.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	31
Tabel III.2	Telahaan Visi, Misi dan Program Gubernur	36
Tabel III.3	Telahaan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	39
Tabel III.4	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah	43
Tabel III.5	Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 (dalam satuan Gg Co2e)	48
Tabel III.5	Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	49
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup	50
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	52
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja DLH Provinsi DKI Jakarta	12
Gambar II.2	Grafik Tingkat Pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	13
Gambar II.3	Grafik Distribusi SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	14
Gambar II.4	Persentase Penanganan Sampah	19
Gambar II.5	Kondisi Kali/Sungai di Jakarta	20
Gambar II.6	Persentase Pengurangan Sampah	21
Gambar VI.1	Upaya-upaya Pengurangan Sampah di Sumber	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; yang meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh BAPPEDA dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan, sedangkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun oleh perangkat daerah.

Renstra perangkat daerah merupakan satu dokumen resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana strategi dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau “roadmap” yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih

Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan rencana strategis kementerian terkait.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf, menyusun Rencana Strategis Tahun 2017-2022, yang merupakan dokumen perencanaan 5(lima) tahunan Dinas Lingkungan Hidup, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi DKI Jakarta

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dapat diacu dalam penyusunan Renstra:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022
7. Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2022

8. Peraturan Gubernur Nomor 284 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

1.3 Maksud dan Tujuan

Penetapan Renstra dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, paling sedikit mencakup:

- Bab I Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
- Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, mencakup Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup (Sumber Daya Manusia, Aset/ Modal), Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup, mencakup Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup, mencakup penentuan tujuan dan sasaran perangkat daerah
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

- Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan, berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- Bab VIII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup terbentuk sejak ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 284 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada akhir Desember 2016. Dinas ini terbentuk dari penggabungan Dinas Kebersihan dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD).

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
3. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan;
4. pembinaan kebijakan, dan pengawasan terhadap pedoman dan standar teknis pelaksanaan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan;
5. pembinaan bantuan teknis dan pengawasan kepada Suku Dinas di bidang program dan kegiatan;
6. penyusunan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP Daerah, RPPLH Daerah serta Amdal dan UKL-UPL;
7. penyelenggaraan inventarisasi sumberdaya alam dan emisi gas rumah kaca;

8. pengelolaan keanekaragaman hayati daerah;
9. perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penempatan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan prasarana dan sarana penanganan lingkungan dan kebersihan;
10. pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ketersediaan, kelaikan dan kecukupan prasarana dan sarana penanganan, lingkungan dan kebersihan;
11. pemantauan, evaluasi, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan penempatan, pengolahan dan pemanfaatan limbah;
12. penelitian/pengkajian, pengujian pengembangan, penerapan dan pasyarakatan sistem, metode dan/atau teknik pengolahan dan teknik pemanfaatan limbah yang efektif, efisien, mudah, tepat dan ramah lingkungan
13. pemantauan, evaluasi dan penanganan lingkungan dan kebersihan di seluruh wilayah daerah/kota Jakarta secara rutin, konsisten dan berkesinambungan sehingga terjamin lingkungan dan kebersihan kota;
14. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perilaku masyarakat dalam membuang sampah serta evaluasi peran serta masyarakat dalam penanganan, pengolahan dan pemanfaatan limbah;
15. pemantauan, pengawasan dan pengendalian sampah di bantaran kali, prasarana dan sarana umum, permukiman, perumahan, area kerja;
16. pemantauan, pengawasan dan pengendalian limbah B3
17. pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan;
18. pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggung-jawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan lingkungan dan kebersihan;
19. pemantauan kualitas lingkungan;
20. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
21. pemberian rekomendasi untuk penerbitan Izin Lingkungan pada tingkat Daerah;
22. pemantauan, penanggulangan dan pemulihan sumber pencemar institusi dan non institusi;

23. pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
24. pengoordinasian, penyediaan fasilitas, pelaksanaan mediasi dan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup dan kebersihan;
25. pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;
26. penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
27. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
28. pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
29. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
30. pelaksanaan standar pelayanan minimal;
31. pengelolaan informasi lingkungan hidup dan kebersihan;
32. pengadaan, penatausahaan, penggunaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana dibidang lingkungan dan kebersihan;
33. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Lingkungan Hidup;
34. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Lingkungan Hidup;
35. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
36. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan. Dan menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan.
- b. Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penetapan kebijakan dan regulasi teknis dibidang lingkungan dan kebersihan;
- c. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Kepegawaian;
3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
4. Subbagian Keuangan.

- d. Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan merupakan unit kerja lini Dinas mempunyai tugas melaksanakan penataan lingkungan dan kebersihan.

Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Teknis Lingkungan dan Kebersihan;
2. Seksi Pengembangan Teknis Lingkungan dan Kebersihan; dan
3. Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim,

- e. Bidang Pengelolaan Kebersihan merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3 dan pengendalian kebersihan.

Bidang Pengelolaan Kebersihan terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Sampah;
2. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
3. Seksi Pengendalian Kebersihan.

- f. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan.

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari:

1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
2. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan; dan

3. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.

- g. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum merupakan Unit lini Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, pengawasan lingkungan dan kebersihan serta penegakan hukum.

Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum terdiri dari:

1. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
2. Seksi Pengawasan Lingkungan dan Kebersihan; dan
3. Seksi Penegakan Hukum.

- h. Bidang Prasarana dan Sarana merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam pengadaan, penyimpanan dan penyaluran serta pemeliharaan prasarana dan sarana.

Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari:

1. Seksi Pengadaan;
2. Seksi Penyimpanan dan Penyaluran; dan
3. Seksi Pemeliharaan.

- i. Bidang Peran Serta Masyarakat merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup untuk pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan.

Bidang Peran Serta Masyarakat terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat;
2. Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat; dan
3. Seksi Bina Usaha Lingkungan dan Kebersihan.

- j. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Kota Administrasi.

Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi terdiri dari:

1. Kepala Suku Dinas;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan;
4. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3;
5. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum;
6. Seksi Prasarana dan Sarana;
7. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan; dan
8. Sub kelompok Jabatan Fungsional.

- k. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Kabupaten Administrasi.

Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi terdiri dari :

1. Kepala Suku Dinas;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan;
 4. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum;
 5. Sub kelompok Jabatan Fungsional.
- l. Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Dinas Lingkungan adalah:

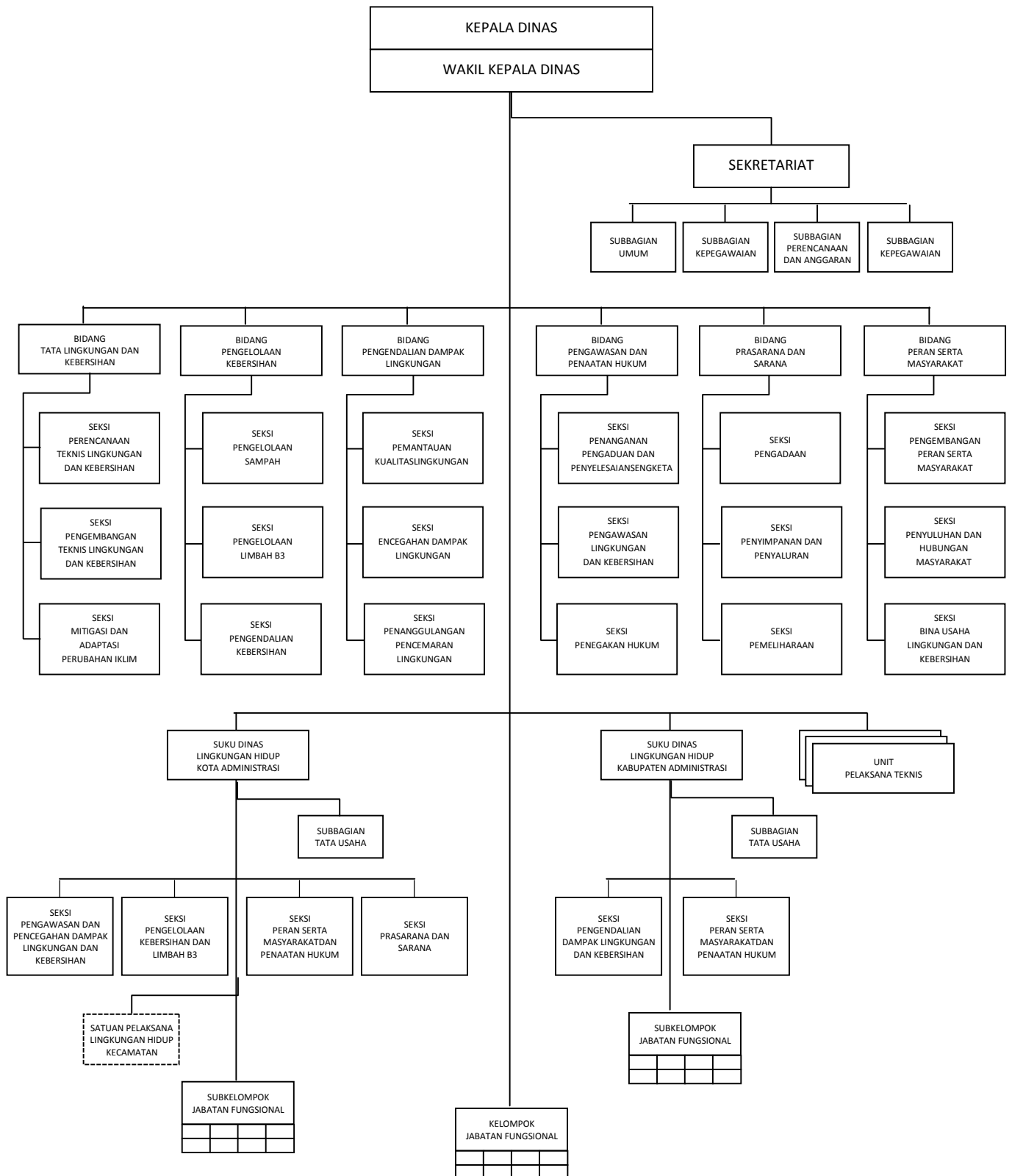
1. Unit Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD), dibentuk dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 398 Tahun 2016. Unit ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisis lingkungan secara laboratoris. LLHD dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang membawahi:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian
 - c. Satuan Pelaksana Fasilitas dan Evaluasi Manajemen Mutu
 - d. Sub kelompok Jabatan Fungsional
2. Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air (UPK BA), dibentuk dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 399 Tahun 2016. Unit ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan penanganan kebersihan badan air. UPK Badan Air mempunyai tugas melaksanakan penanganan kebersihan di kali, sungai, rawa, danau, waduk, situ dan embung. UPK Badan Air dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang membawahi:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana
 - c. Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Kota Administrasi
 - d. Sub kelompok Jabatan Fungsional

3. Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) dibentuk dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 400 Tahun 2016. Unit ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengolahan sampah terpadu. Unit ini bertugas melaksanakan pengelolaan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan Pengelolaan Kawasan Mandiri UPST dipimpin oleh Kepala Unit yang membawahi:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Satuan Pelaksana Pengolahan Energi Terbarukan, Komposting dan Reduce, Reuse, Recycle serta Pemrosesan Akhir Sampah
 - c. Satuan Pelaksana Pengelola Kawasan Mandiri
 - d. Sub Kelompok Jabatan Fungsional

m. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Dinas Lingkungan Hidup. Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas dan Sub kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Dinas atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dan Sub kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Sub kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis. Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Sub kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Kepala Dinas dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai dengan keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.



2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

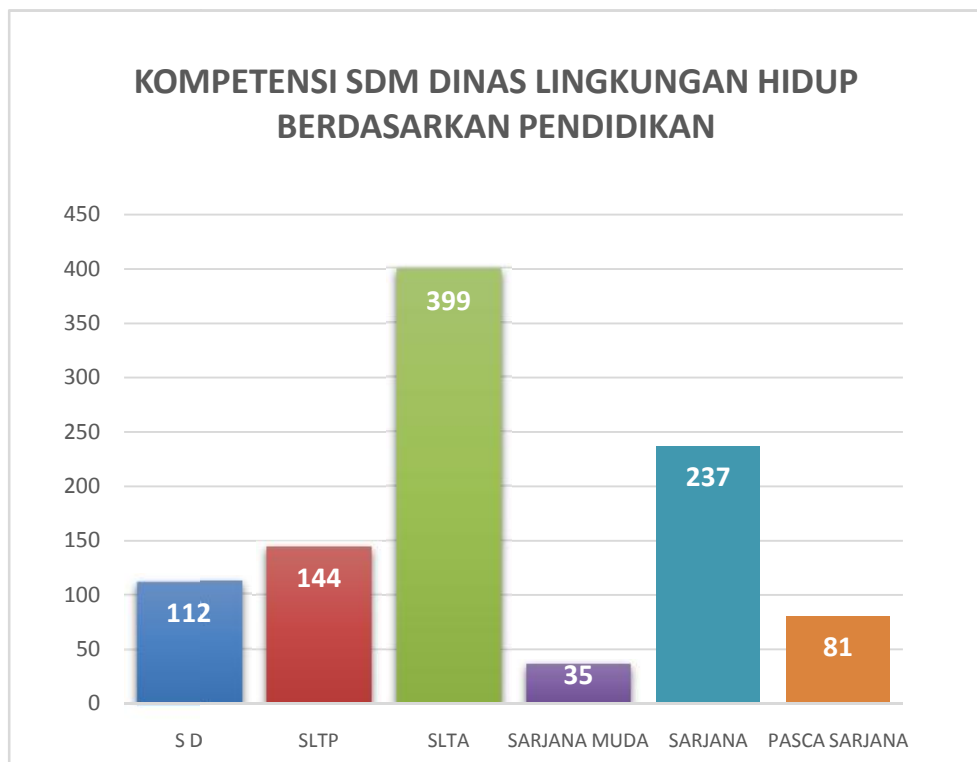
Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategik, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal berasal dari aspek-aspek sumberdaya manusia (SDM) dan aset/modal.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian sasaran suatu program dan kegiatan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut.

Berdasarkan data per akhir tahun 2017, jumlah pegawai Dinas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu serta UPT adalah sebanyak 1.008 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kualifikasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tingkat pendidikan dan distribusi di Dinas, Suku Dinas dan UPT dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

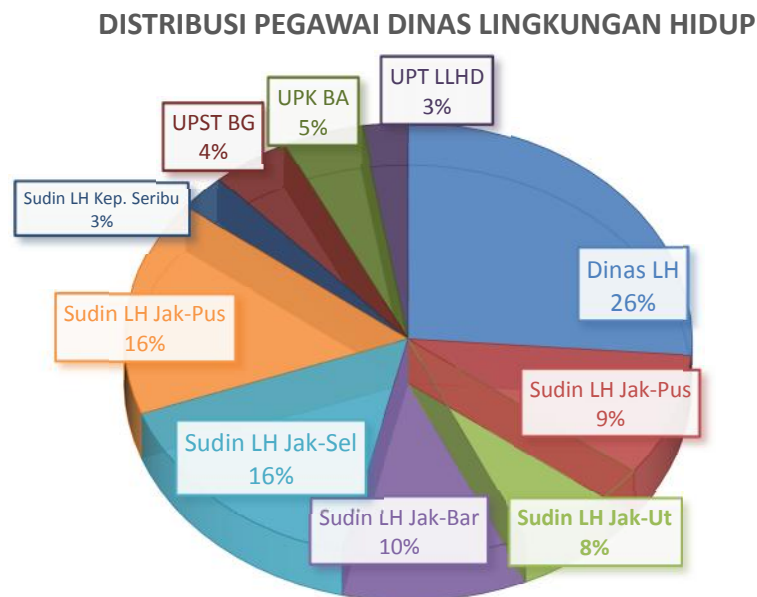
Gambar II. 2. Grafik Tingkat Pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta



Kompetensi dan kapasitas SDM yang ada terus ditingkatkan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan yang diselenggarakan kementerian, pemerintah daerah dan internal.

Kondisi distribusi pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas dan UPT dapat dilihat pada Gambar II.2. Dari grafik dapat dilihat persentase SDM paling tinggi ada di Dinas yaitu 26% dan 74% terdistribusi pada 6 (enam) Suku Dinas dan 3 (tiga) UPT

Gambar II. 3. Grafik Distribusi SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta



Selain SDM yang berstatus sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS). Dukungan SDM Dinas Lingkungan Hidup juga berasal dari tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) sebanyak 10.205 orang. Sebagian besar sebagai tenaga operasional lapangan yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Unit Pengelola Sampah Terpadu, Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air, Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

PJLP tersebut didayagunakan antara lain sebagai Kru Kendaraan Angkutan Sampah, Petugas Kebersihan Badan Air/Saluran Mikro/PHB, Operator Alat Berat, Petugas Sampah 3R, Pengawas Lapangan, Petugas Saringan Sampah, Pengawas Kebersihan dan operator di TPST Bantargebang. Sampai dengan

akhir Desember 2017, rincian selengkapnya tenaga PJLP dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.1 Data Tenaga PJLP

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Dinas LH	174	27	201
2	Sudin LH Jakarta Pusat	957	40	997
3	Sudin LH Jakarta Utara	1.239	69	1.308
4	Sudin LH Jakarta Barat	853	60	913
5	Sudin LH Jakarta Selatan	875	61	936
6	Sudin LH Jakarta Timur	1.081	77	1.158
7	Sudin LH Kepulauan Seribu	2	2	4
8	Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST)	670	75	745
9	Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air (UPK BA)	3.871	63	3.934
10	UPT Laboratorium LH Daerah (UPT LLHD)	3	6	9
TOTAL		9.725	480	10.205

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai sarana dan prasarana berupa armada-armada pengangkutan, alat berat dan tempat penampungan sampah sementara serta prasarana lainnya.

a. Sarana Pengangkutan

Sarana angkutan kebersihan yang umum digunakan adalah sampah bak terbuka (dump truk), truk sampah arm roll (hydraulis) dan truk sampah dengan pemadatan (compactor). Kekuatan armada pengangkutan dan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2. Data Kendaraan Angkutan Sampah

Data angkutan sampah	SKPD/UKPD									
	Dinas	Jakpus	Jakut	Jakbar	Jaksel	Jaktim	Pulau Seribu	UPK BA	UPST	Grand Total
Truk Arm Roll Besar	19	27	34	31	30	37	-	1	-	179
Truk Arm Roll Kecil	13	28	26	26	40	43	-	3	-	179
Dump Truk/Typer Besar	32	85	116	111	122	146	5	32	1	650
Dump Truk/Typer Kecil	40	96	117	110	76	119	1	50	3	612
Tronton	1	-	5	7	9	9	-	8	-	39
Truk Kompaktor Besar	73	20	19	18	18	17	-	-	-	165
Truk KompakTor Kecil	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26
Kapal Fiberglass	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Kapal Kargo	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
Kapal Patroli	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Perahu Aluminium	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25
Palka	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
Perahu Styrofoam Tidak Bermesin	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
Perahu Styrofoam Bermesin	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
Perahu Ketamaran	-	-	-	-	-	-	-	29	-	29
Grand Total	204	256	317	303	295	371	19	466	4	2.235

(sumber data: KIB DLH Desember 2017)

b. Alat Berat

Selain sarana pengangkutan, kekuatan Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah juga didukung dengan sarana alat berat yang ada. Jumlah alat berat yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.3. Data Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup

Data alat berat	SKPD/UKPD									
	Dinas	Jakpus	Jakut	Jakbar	Jaksel	Jaktim	Pulau Seribu	UPK BA	UPST	Grand Total
Wheel Loader	21	7	4	11	11	10	-	4	11	79
Buldozer	-	-	10	-	-	-	-	-	15	25
Crane	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Excavator	-	-	-	-	-	-	-	111	35	146
Forklift	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Self Loader	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Refuse Compactor	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
Kapal Pembersih Gulma	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Dredger Multiguna	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dredger Ponton								4		4
Amphibious Multifungsi (Conver)								6		6
Shovel	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Grand Total	26	7	14	11	11	10	0	133	69	293

(sumber data: KIB DLH Desember 2017)

c. Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU)

Pengukuran kualitas udara ambien di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan menggunakan metoda otomatis berupa Stasiun Pemantau Kualitas Udara di 5 (lima) wilayah kota DKI Jakarta.

Secara umum perangkat stasiun pemantau kualitas udara akan mengukur parameter pencemar udara dan memberikan hasil berupa data display Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Indeks Standar

Pencemar Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan, yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambient di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan dampak makhluk hidup lainnya.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki 1 (satu) *mobile station* yang ditempatkan di lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan 5 (lima) unit *fixed station*. Lokasi Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di DKI Jakarta adalah:

1. DKI 1 Bundaran HI, Jakarta Pusat
2. DKI 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara
3. DKI 3 Jagakarsa, Jakarta Selatan
4. DKI 4 Museum Lubang Buaya, Jakarta Timur
5. DKI 5 Perumahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawabnya sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun, harus diakui bahwa secara umum di kota Jakarta masih belum terwujud budaya bersih dan kesadaran lingkungan seperti yang diharapkan oleh semua pihak.

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Secara ringkas, kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (Dinas Kebersihan dan BPLHD) Tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut:

a. Persentase Penanganan Sampah

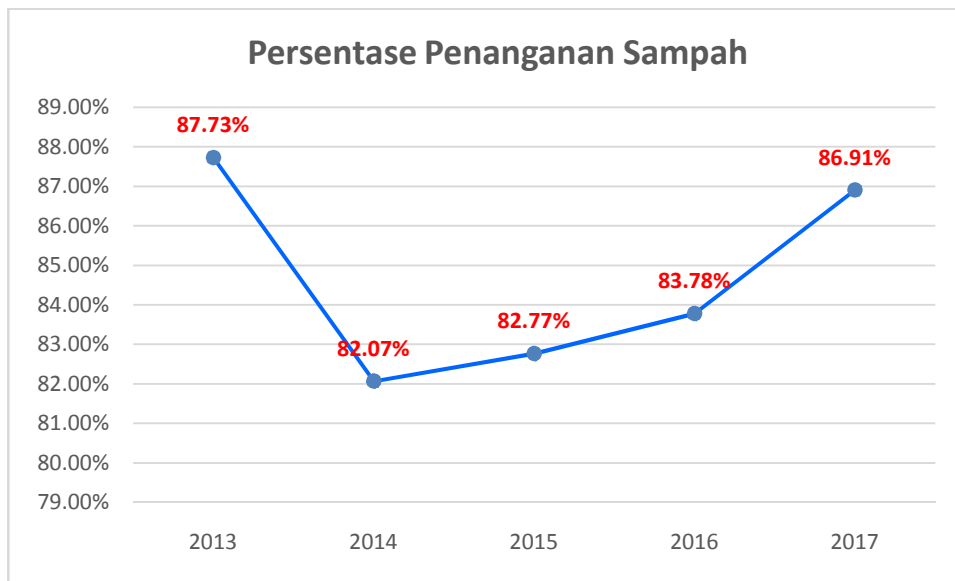
Indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2013-2017 telah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase penanganan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya walaupun ditahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun 2013.

Tahun 2013 persentase penanganan sampah tercatat 87,73% dari 6.481,65 ton/hari produksi sampah sedangkan di tahun 2014 persentase penanganan sampah tercatat 82,07% dari 6.902,41 ton/hari produksi sampah. Pada tahun 2013 dan 2014 penanganan sampah dilakukan dengan pola swastanisasi yang melibatkan pihak swasta dalam

pengangkutan sampah, namun sejak tahun 2015 pola swastanisasi diubah menjadi pola swakelola.

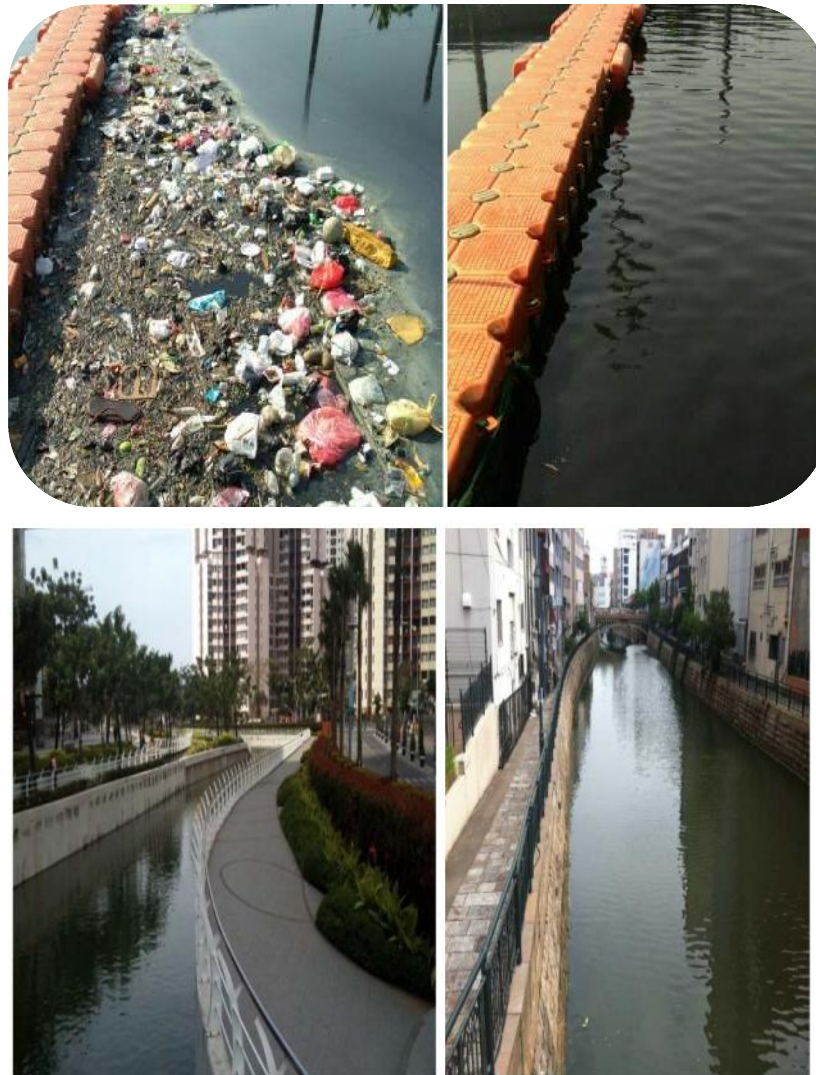
Dari tahun 2014 persentase penanganan sampah terus mengalami peningkatan sampai tahun 2017 penanganan sampah meningkat menjadi 86,91% dari 7.911ton/hari produksi sampah. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik di bawah ini.

Gambar II.4. Persentase Penanganan Sampah



Kinerja nyata Dinas Lingkungan Hidup (dahulu Dinas Kebersihan) dalam penanganan sampah dapat dilihat dari kondisi kali/sungai yang sudah jauh lebih bersih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sejak terbentuknya Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air (UPK BA) di tahun 2014 cakupan penanganan sampah sungai/kali, situ dan waduk sudah makin luas.

Gambar II.5 Kondisi Kali/Sungai di Jakarta



Kendala yang cukup berarti dalam penanganan sampah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan juga masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi jadwal buang sampah yang telah ditentukan di TPS.

b. Persentase Pengurangan Sampah di Kota

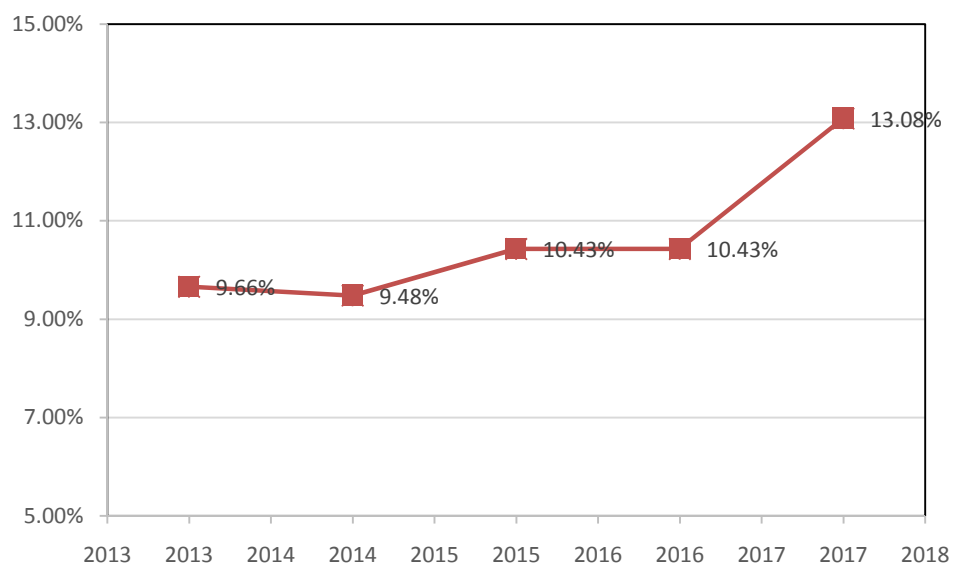
Paradigma lama sistem pengelolaan sampah menitikberatkan pada penanganan sampah yang terfokus kepada pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke TPA. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru ketika penampungan di TPA sudah melebihi kapasitas. Pengelolaan sampah paradigma baru terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Tujuannya adalah untuk

membatasi timbulan sampah dari sumbernya dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui upaya 3R yaitu pengurangan/pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*).

Paradigma baru pengelolaan sampah mendorong adanya pengelolaan sampah dari sumber dengan tujuan utamanya menciptakan sebuah kawasan yang bersih dan sehat. Dari beberapa komposisi sampah yang ditimbulkan di sumber, beberapa komposisi sampah seperti sampah organik, plastik dan kertas dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kegunaan lain. Di lain sisi pemanfaatan hasil pengelolaan sampah berupa energi, pupuk atau bahan baku industri merupakan nilai tambah.

Indikator kinerja pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2013-2017 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase pengurangan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya. Tahun 2013 persentase pengurangan sampah tercatat 9.66%, kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 13.08% dari 7.911 ton produksi sampah. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik di bawah ini.

Gambar II.6 Persentase Pengurangan Sampah



Pengurangan timbulan sampah disumber belum mencapai hasil yang optimal antara lain dikarenakan:

- a. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurangi sampah melalui pengurangan penggunaan kemasan/wadah sekali pakai
- b. Masyarakat masih belum merasakan secara langsung manfaat dalam memilah sampah disumber.
- c. Kurangnya bank sampah yang tersebar di wilayah kecamatan dan kelurahan.

c. Pemantauan Status Mutu Air

Pemantauan status mutu air baku sepanjang tahun 2013 hingga 2017 dilakukan terhadap air sungai, situ/waduk, air tanah, serta perairan laut dan muara Teluk Jakarta dengan pelaksanaan pemantauan pada tabel berikut:

Tabel II.4. Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta

No.	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Air Sungai	13 sungai, 67 titik	13 sungai, 70 titik	13 sungai, 80 titik	13 sungai, 80 titik	13 sungai, 90 titik
2	Air Situ/ Waduk	40 situ	40 situ	40 situ	40 situ	40 situ
3	Air Tanah	100 titik	150 titik	200 titik	267 titik	267 titik
4	Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta	45 titik	45 titik	45 titik	45 titik	45 titik

Berdasarkan hasil pemantauan dilakukan analisis menggunakan metode Indeks Pencemar tentang kondisi air, berikut adalah hasil analisa terhadap kualitas air sungai, air tanah, air situ/waduk, perairan teluk Jakarta dan muara yang disajikan berikut ini.

Tabel II.5. Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk berdasarkan Indeks Pencemar

No.	Status	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Baik	2%	0%	0%	0%	2.50%
2	Tercemar Ringan	30%	2%	57%	3%	21.25%
3	Tercemar Sedang	40%	70%	33%	68%	19.00%
4	Tercemar Berat	28%	28%	10%	29%	57.25%

Berdasarkan pemantauan tahun 2013 hingga 2017, kondisi kualitas air situ/waduk di Jakarta mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 status mutu air situ/waduk tercemar berat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2015 dan 2016. Parameter dominan yang mencemari kualitas air situ/waduk yaitu coliform, fecal coli, detergen, phosphate dan organik. Hal ini dapat disebabkan banyaknya situ/waduk sebagai tempat buangan air limbah rumah tangga.

Tabel II.6. Status Mutu Pemantauan Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemar

No.	Status	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Baik	0%	1%	1%	0%	0%
2	Tercemar Ringan	10%	23%	17%	0%	12%
3	Tercemar Sedang	32%	44%	39%	40%	27%
4	Tercemar Berat	58%	32%	43%	60%	61%

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 13 (tiga belas) sungai yang ada di Provinsi DKI Jakarta pada 90 (sembilan puluh) titik pemantauan. Berdasarkan hasil pemantauan status mutu air sungai juga mengalami penurunan kualitas. Sungai-sungai yang ada sebagian besar sudah tercemar berat oleh limbah domestik (70%) dan oleh kegiatan lain (30%).

Tabel II.7. Status Mutu Pemantauan Air Tanah berdasarkan Indeks Pencemar

No.	Status	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Baik	34%	0%	38%	46%	32%
2	Tercemar Ringan	37%	99%	45%	28%	35%
3	Tercemar Sedang	17%	1%	15%	24%	21%
4	Tercemar Berat	12%	0%	3%	2%	12%

Pengambilan sampel air tanah dilakukan tersebar pada seluruh wilayah kota administrasi, hal ini untuk mengetahui kondisi air tanah dangkal yang digunakan oleh warga DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2013 s.d 2017, kondisi air tanah di DKI Jakarta sebagian besar masih dalam kondisi baik.

Tabel II.8. Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemar

No.	Status	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2017
1	Baik	0%	0%	0%	4%	0%
2	Tercemar Ringan	0%	0%	0%	61%	0%
3	Tercemar Sedang	26.1%	17.4%	17.4%	35%	64%
4	Tercemar Berat	73.9%	82.6%	82.6%	0%	36%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kualitas perairan laut teluk Jakarta mengalami penurunan kualitas, kondisi status mutu air tercemar berat yang berkurang pada tahun 2015 meningkat kembali di tahun 2017.

Tabel II. Status Mutu Pemantauan Perairan Muara Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemar

No.	Status	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2017
1	Memenuhi BM	0%	0%	0%	0%	0%
2	Tercemar Ringan	25%	0%	0%	9.1%	0%
3	Tercemar Sedang	25%	40%	40%	27.3%	47%
4	Tercemar Berat	50%	60%	60%	63.6%	53%

Sedangkan kondisi status mutu muara Teluk Jakarta berdasarkan tabel di atas mengalami penurunan kualitas. Pada tahun 2015 status mutu dengan kategori tercemar berat mengalami peningkatan dari 60% menjadi 63% pada tahun 2016.

d. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan yang penting dalam upaya pencegahan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan tersebut. Melalui Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup melakukan penilaian terhadap analisis mengenai dampak lingkungan. Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta telah mendapatkan lisensi dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dimana lisensi yang terbaru diberikan pada tanggal 12 Oktober 2017.

Sampai dengan tahun 2017, telah dihasilkan 5.006 kegiatan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan, yang meliputi 1.883 kegiatan usaha memiliki dokumen lingkungan berskala Amdal dan 3.123 kegiatan usaha telah memiliki dokumen lingkungan berskala UKL-UPL. Terkait dengan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh setiap pemrakarsa kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan terhadap penataan dan komitmen dari pemrakarsa kegiatan untuk melaksanakan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen AMDAL dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sedangkan pengawasan pelaksanaan dokumen UKL/UPL dilaksanakan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing kota administrasi. Pengawasan implementasi dokumen lingkungan di Provinsi DKI Jakarta masih belum terlaksana 100%. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan pada tahun 2016 sebanyak 47% dari seluruh perusahaan wajib AMDAL dan UKL/UPL. Meski demikian, capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang hanya sebanyak 34% dari seluruh perusahaan wajib AMDAL sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.10. Pengawasan Terhadap Implementasi Amdal dan UKL/UPL

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kegiatan usaha yang mempunyai dokumen lingkungan (AMDAL) dan UKL/UPL yang diawasi	1,234	1,827	1,674	2,302	2,342
2	Jumlah kegiatan usaha yang mempunyai dokumen lingkungan (AMDAL) dan UKL/UPL	3,651	3,982	4,415	4,899	4,974
3	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan (AMDAL) dan UKL/UPL	33.80%	45.88%	37.92%	46.99%	47.08%

Dalam tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup telah menerbitkan rekomendasi untuk 73 dokumen AMDAL dan melakukan pengawasan terhadap 1.442 kegiatan usaha yang diawasi dalam rangka implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

e. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum merupakan salah satu cara atau strategi dalam mendorong penataan terhadap standar, baku mutu dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Dibandingkan dengan penegakan hukum pidana dan keperdataan, penegakan hukum administrasi walaupun ada unsur paksaan (force), namun jenis penegakan hukum ini memiliki fungsi pencegahan (preventive). Melalui pengawasan yang konsisten dan teratur maka berbagai bentuk pelanggaran izin dan peraturan perundang-undangan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan dapat dicegah sedini mungkin. Tanpa ada upaya penegakan hukum lingkungan dan kebersihan yang pasti, lingkungan akan menjadi korban akibat dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang tidak memperhatikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Penegakan hukum lingkungan di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2013-2017 telah menunjukkan capaian kinerja yang positif. Selama lima tahun, persentase penanganan penegakan hukum lingkungan telah mencapai angka 100%, kecuali pada tahun 2014 yang mencapai 94%. Hal ini bermakna Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menyelesaikan setiap kasus lingkungan yang terjadi.

Tabel II.11. Data Penegakan Hukum Lingkungan

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	70	271	147	114	326
2	Jumlah kasus lingkungan yang ada	70	288	147	114	326
3	Penanganan penegakan hukum lingkungan	100%	94%	100%	100%	100%

Secara lebih lengkap capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan RPJMD tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.12.Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=capaian/target x 100%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu	90%	93%	96%	98%	100%	87.73%	82.07%	82.77%	83.78%	86.91%	97.48%	88.25%	86.22%	85.49%	86.91%
2	Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber	14%	14%	15%	15%	15%	9.66%	9.48%	10.43%	10.43%	13.08%	69.00%	67.71%	69.53%	69.53%	87.27%
3	Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	70	80	80	90	90	79	80	85	90	90	113%	100%	106%	100%	100%
4	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	50	50	50	50	56	63	43	22	78	56	126%	86%	44%	156%	100%
5	Terpenuhinya baku mutu air limbah dan berkurangnya beban air limbah proses yang terbuang	200	200	200	200	200	200	193	581	1325	200	100%	97%	291%	663%	100%
6	Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	50	60	70	80	90	54	68	125	336	90	108%	113%	179%	420%	100%
7	Terinformasikannya kualitas udara secara kontinu di 5 wilayah kota administrasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah dokumen lingkungan yang	80	80	75	75	70	119	91	120	159	73	149%	114%	160%	212%	104%
9	Terlaksananya peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup	75	150	225	300	375	411	58	104	300	375	548%	39%	46%	100%	100%
10	Jumlah sektor yang dimonitoring dan evaluasi dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca	6	6	6	7	7	6	6	6	7	7	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat pencapaian kinerja dari tahun 2012 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan bahkan pada tahun 2016 melebihi target yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang merupakan indikator masukan, keluaran dan hasil. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber atau oleh suatu pihak saja.

2.3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan, selanjutnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta akan dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanannya melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kebersihan periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Tabel II.13. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Uraian		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Total
Anggaran pada Tahun	2013	1.447.269.566.494	153.088.005.925	1.600.357.572.419
	2014	2.985.907.727.393	158.485.178.000	3.144.392.905.393
	2015	2.751.526.301.097	247.873.135.968	2.999.399.437.065
	2016	2.095.368.045.442	322.351.456.599	2.417.719.502.041
	2017	2.136.626.262.058	264.941.888.820	2.401.568.150.878
Realisasi Anggaran pada Tahun	2013	1.264.696.716.596	143.051.783.084	1.407.748.499.680
	2014	1.879.466.642.126	134.131.465.103	2.013.598.107.229
	2015	1.935.329.229.889	241.957.060.010	2.177.286.289.899
	2016	1.553.752.214.618	296.599.370.180	1.850.351.584.798
	2017	1.599.175.924.216	247.758.332.115	1.846.934.256.331
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	2013	87,39%	93,44%	87,96%
	2014	62,94%	84,63%	64,04%
	2015	70,34%	97,61%	72,59%
	2016	74,15%	92,01%	76,53%
	2017	74,85%	93,51%	76,91%
Rata-rata Pertumbuhan	Anggaran	3,41%	10,23%	10,84%
	Realisasi	-3,13%	1,75%	-2,76%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta.

2.4.1. Tantangan

- Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya alam.
- Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
- Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.
- Masih lemahnya sanksi penegakan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.
- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
- Peningkatan timbulan sampah dan keterbatasan lahan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi pola penanganan sampah seperti kebutuhan ITF dalam kota.
- Lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran pembuangan sampah merupakan tantangan aparat hukum bagaimana penerapan perda dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
- Peningkatan kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih mengoptimalkan fungsi dinas sebagai operator maupun sebagai regulator.

2.4.2. Peluang

- Isu lingkungan dan kebersihan merupakan isu global
- Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang bersih dan sehat dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Kerjasama dalam dan luar negeri dalam pengelolaan lingkungan yang dapat dimanfaatkan.
- Desentralisasi dan otonomi daerah sebagai penyelenggara pengelolaan sumberdaya alam.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini akan dijelaskan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta khususnya untuk jangka waktu 2017-2022.

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta pada Bab II, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kebersihan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Utama	Permasalahan	Indikator Kinerja	Analisa
Pembangunan ekonomi dan infrastruktur	Jumlah daya tampung TPS yang tidak memadai	Rasio TPS per Satuan Penduduk	Jumlah daya tampung TPS tidak meningkat selama 5 tahun terakhir, namun jumlah penduduk meningkat terus. Hal ini mengakibatkan rasio Tempat Penampungan Sementara (TPS) per satuan penduduk terus menurun.
	Pengurangan dan penanganan sampah belum optimal	Persentase pengurangan & penanganan sampah	Penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik namun pengurangan sampah masih belum optimal
Kota Lestari	Kondisi air situ/waduk tercemar berat	Pencemaran Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk	Kondisi air situ/waduk berdasarkan pemantauan tahun 2013-2017 di DKI Jakarta mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada

			kondisi tercemar berat pada tahun 2017 meningkat menjadi 57,25% dari 29% pada tahun 2016 karena belum adanya sistem drainase air limbah buangan domestik dan limbah septik tank	
	Kualitas air sungai mengalami penurunan	Status Pemantauan Sungai	Mutu Air	Pada tahun 2017 kualitas air sungai mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh belum adanya sistem drainase air limbah buangan domestik dan limbah septik tank serta adanya pencemaran di hulu sungai yang berada di luar wilayah DKI Jakarta
	Pengawasan terhadap dokumen lingkungan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan UKL/UPL masih minim	Pengawasan Terhadap Amdal		Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) bagi perusahaan/ kegiatan usaha masih berada pada persentase 47,08 persen pada tahun 2016, hal ini disebabkan pertumbuhan kegiatan/usaha tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih adalah:

Visi:

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”

Misi:

- 1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.**
- 2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.**
- 3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.**
- 4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.**
- 5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.**

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta akan mendukung pelaksanaan misi nomor 2 dan 4 sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih.

Misi Kedua: Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kesempatan kerja	Berkurangnya tingkat pengangguran
Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif	Meningkatnya kewirausahaan baru
Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat
Mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya kesenjangan sosial Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat
Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi Meningkatnya akses sanitasi layak Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua masyarakat Jakarta Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta	Meningkatnya pertumbuhan investasi
Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Misi Keempat : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	<ul style="list-style-type: none">• Terbangunnya kota yang berwawasan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari• Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)• Melambatnya penurunan muka air tanah• Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya

Dari misi yang telah dipilih tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah wakil kepala daerah, seperti dalam tabel 3.2.

Tabel III.2.
Telahaan Visi, Misi dan Program Gubernur

Visi : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2: Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.	1. Jumlah daya tampung TPS tidak memadai 2. Jakarta belum memiliki ITF dalam kota	1. Keterbatasan lahan untuk pengumpulan dan pengolahan sampah 2. Belum optimalnya manajemen penanganan sampah di TPS 3. Belum adanya mekanisme kerjasama pemerintah dan swasta yang terinci dalam pembangunan instalasi pengolahan sampah dalam kota (ITF)	1. Tenaga pendukung non PNS yang memadai di TPS 2. Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi 3. Teknologi pengolahan sampah yang berkembang pesat. 4. Adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup 5. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam pembangunan ITF (Perpres 35 tahun 2018)
2	Misi 4: Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.	1. Pencemaran air tanah, air permukaan dan udara yang disebabkan aktivitas manusia dan industri 2. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup perkotaan	1. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup 2. Belum adanya instalasi pengolahan air limbah domestik dan perluasan layanan pengolahan limbah septik tank	1. Perubahan struktur SKPD pengelola lingkungan hidup dari badan (BPLHD) menjadi Dinas Lingkungan Hidup (penggabungan BPLHD dan Dinas Kebersihan)

			<p>3. Belum sinerginya program penanggulangan pencemaran antar sektor terkait</p> <p>4. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan</p> <p>5. Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>6. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan dan atau usaha</p> <p>7. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang belum memadai</p> <p>8. Belum tersedianya standar teknologi pengelolaan lingkungan dan kebersihan yang sesuai dengan kondisi Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>2. Tenaga pendukung non PNS dalam pengawasan yang memadai</p> <p>3. Adanya kelompok masyarakat dan swasta yang peduli terhadap lingkungan hidup</p> <p>4. Tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dengan semua sektor terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan</p>
--	--	--	---	---

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

- (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
- (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
- (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah:

1. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*;
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain)

Berdasarkan hal tersebut, maka identifikasi permasalahan berdasarkan renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti dalam tabel 3.3.

Tabel III.3

Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Sasaran Renstra Kementerian LHK	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5 - 68,5 pada tahun 2019 yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKLH Jakarta baru mencapai 36.41 2. Pencemaran air tanah dan air permukaan yang disebabkan aktivitas manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan struktur SKPD pengelola lingkungan hidup dari badan (BPLHD) menjadi Dinas Lingkungan

Sasaran Renstra Kementerian LHK	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup yang handal;	3. Peningkatan pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi.	<p>lingkungan hidup</p> <p>2. Belum adanya instalasi pengolahan air limbah domestik</p> <p>3. Belum sinerginya program penanggulangan dan pencemaran antar sektor terkait</p> <p>4. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan</p> <p>4. Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>5. Belum optimalnya pengawasan kegiatan dan usaha</p>	<p>Hidup (penggabungan BPLHD dan Dinas Kebersihan</p> <p>2. Tenaga pendukung non PNS dalam pengawasan yang memadai</p> <p>3. Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi (termasuk UPT Laboratorium)</p> <p>4. Adanya kelompok masyarakat dan swasta yang peduli terhadap lingkungan hidup</p>
Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegiatan mitigasi untuk menurunkan emisi GRK sebesar mendekati 26 persen pada tahun 2019 di lima sektor prioritas, yaitu: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah	Percepatan pencapaian target penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca)	<p>1. Kewenangan untuk melaksanakan kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK dan adaptasi perubahan iklim berada di instansi pusat, SKPD lain, lembaga pusat dan daerah</p> <p>2. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi dalam implementasi aksi-aksi mitigasi dan adaptasi</p>	<p>1. Perubahan iklim adalah masalah global</p> <p>2. Metodologi IPCC 2006</p> <p>3. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dalam dan luar negeri</p> <p>4. Telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca</p> <p>5. Rencana Tata</p>

Sasaran Renstra Kementerian LHK	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		perubahan iklim 3. Akses data dan informasi yang relevan dengan perubahan iklim masih terbatas	Ruang Wilayah (RTRW) 2030

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Visi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang ditetapkan dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 adalah:

“Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun prasarana dan sarana kota yang manusiawi
2. Mengoptimalkan produktivitas kota sebagai kota jasa berskala dunia.
3. Mengembangkan budaya perkotaan
4. Mengarusutamakan pembangunan berbasis mitigasi bencana
5. Menciptakan kehidupan kota yang sejahtera dan dinamis
6. Menyeraskan kehidupan perkotaan dengan lingkungan hidup.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, tata ruang untuk sistem sarana dan prasarana pengelolaan sampah terdapat dalam pasal 51

- (1). Pengembangan sistem prasarana dan sarana pengelolaan sampah terdiri dari:
 - a. Prasarana dan sarana pengelolaan sampah lingkungan dan kawasan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS)

- c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 - e. Pengelolaan sampah drainase/sungai/waduk/situ/teluk
 - f. Pengelolaan sampah spesifik.
- (2). Pengembangan prasarana dan sarana sampah diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan menjaga kualitas lingkungan, dengan cara sebagai berikut:
- a. Meningkatkan peran serta masyarakat yang dilaksanakan melalui program 3R (*reuse, reduce, recycle*) sejak dari sumbernya.
 - b. Mengembangkan prasarana dan sarana pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan.
 - c. Mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan sampah secara terpilah.
- (3). Pengembangan prasarana dan sarana TPS dan TPST dikembangkan sebagai suatu sistem multi simpul yang terbagi dalam beberapa kawasan atau zona pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pengelolaan sampah serta mengurangi volume sampah yang harus dikirim ke TPA.
- (4). Prasarana dan sarana TPS dan TPA dapat dikembangkan untuk mengolah sampah menjadi sumber energi pembangkit listrik alternatif dan pengomposan (*composting*) serta menjadi produk-produk bermanfaat lainnya yang memungkinkan.

Selanjutnya dibawah ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel III.4
 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana tata ruang untuk sistem prasarana dan sarana pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pengelolaan sampah sungai/situ/waduk yang belum maksimal • Jumlah daya tampung TPS tidak memadai • Jakarta belum memiliki ITF dalam kota • Belum tertanganinya pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari rumah tangga. • Reduksi timbulan sampah dari sumber masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi dalam pengelolaan sampah drainase/sungai/waduk/situ/ teluk • Terbatasnya lahan untuk TPS • Resistensi masyarakat terhadap pembangunan sarana pengolahan sampah (ITF & TPST) • Belum optimalnya pengolahan sampah di TPS • Belum ada standarisasi pengolahan sampah di TPS • Belum adanya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak ketiga (swasta dan masyarakat) siap bekerja sama dalam peningkatan kebersihan kota • Adanya kelompok masyarakat pengelola sampah di lingkup kecil. • Teknologi untuk perbaikan lingkungan dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan berkembang pesat. • Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi.
2.	Mengendalikan pencemaran air	1. Masih tingginya pencemaran air tanah, air permukaan	1. Belum adanya mekanisme penanganan pengendalian	1. Adanya regulasi tentang pengendalian pencemaran air.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>yang disebabkan oleh aktifitas manusia dan industri</p> <p>2. Belum optimalnya penanganan limbah padat terutama di area sumber-sumber air.</p> <p>3. Belum optimalnya pengawasan kegiatan dan usaha</p> <p>4. Peruntukan zonasi yang tidak sesuai dengan aturan RTRW</p>	<p>pencemaran air yang terpadu.</p> <p>2. Masih kurangnya instrumen pengendalian pencemaran air.</p> <p>3. Kurangnya koordinasi antar sektor dalam mengendalikan pencemaran air.</p> <p>4. Belum adanya sarana instalasi pengolahan air limbah domestik</p>	<p>2. Adanya regulasi tentang penegakan hukum lingkungan hidup</p> <p>3. Adanya lembaga (pemerintah dan non pemerintah) yang perhatian terhadap pencemaran lingkungan.</p>

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan kajian kondisi pengelolaan lingkungan hidup saat ini dan berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; telaahan visi, misi, serta program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian LHK, implikasi Rencana Tata Ruang Tata Wilayah bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan Timbulan Sampah

Permasalahan lingkungan perkotaan di Jakarta yang dominan saat ini adalah masalah kepadatan penduduk dan bangunan tinggi yang terus meningkat, masalah sanitasi kota, masalah persampahan, kualitas air, kemacetan, banjir rob.

Permasalahan kepadatan Kota Jakarta semakin kompleks dengan perkembangan jumlah penduduk yang sangat tinggi, terutama penduduk yang tidak tetap. Jumlah penduduk merupakan ancaman dan pressure terbesar

bagi masalah lingkungan hidup di perkotaan. Setiap penduduk memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup, di sisi lain setiap orang juga menghasilkan limbah/sampah dalam beragam bentuk. Pertambahan penduduk yang sangat tinggi di Jakarta menyebabkan peningkatan timbulan sampah yang jika tidak dikendalikan akan berdampak pada penumpukan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu keindahan kota.

b. Rasio TPS yang stagnan.

Permasalahan rasio TPS dikarenakan keterbatasan lahan baik dalam mendapatkan lahan baru maupun lahan TPS yang sudah ada. Sebagian lahan TPS yang sudah ada bukan merupakan aset dari Dinas Lingkungan Hidup sehingga mengalami kendala dalam pemanfaatannya.

c. Jakarta belum memiliki ITF (*Intermediate Treatment Facility*) dalam kota

TPST Bantargebang masih merupakan satu-satunya tempat pemrosesan akhir yang mempunyai keterbatasan daya tampung. Sampai saat ini semua sampah yang ada di TPS diangkut ke TPST Bantargebang. Proses pengolahan sampah yang dilakukan di TPST Bantargebang adalah *controlled landfill* yang memiliki keterbatasan daya tampung mengingat adanya keterbatasan lahan. Hal ini mendorong perlunya percepatan pembangunan tempat pengolahan sampah dalam kota (ITF) dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.

c. Pencemaran Lingkungan (air, udara dan kerusakan tanah)

Pencemaran lingkungan melalui media air, udara dan tanah menjadikan kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Pencemaran ini bersumber dari kegiatan usaha/industri, rumah tangga maupun transportasi. Hal ini harus dapat ditanggulangi dengan pencegahan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan. Dampak pencemaran yang bersifat akut dan kronis perlu segera diantisipasi agar sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

- d. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup perkotaan
- Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari ketersediaan sumber daya alam, baik berupa udara, air, tanah, dan sumber daya alam lainnya termasuk sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Namun demikian, harus kita sadari bahwasannya sumber daya alam yang selama ini kita nikmati memiliki keterbatasan dalam banyak hal, seperti keterbatasan dalam segi kuantitas, kualitas, ruang, dan waktu. Oleh karena itu manusia dituntut untuk menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien demi keberlanjutan sumber daya di masa mendatang.

Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari pengelolaan serta penggunaan sumber daya alam. Namun kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan serta daya dukung dari lingkungan tersebut mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, serta merosotnya kualitas dari lingkungan tersebut. Banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan merosotnya kualitas lingkungan yang dapat kita identifikasi dari pengamatan di lapangan.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya alam, tidak hanya melempar tanggung jawab kepada pemerintah saja. Artinya kita tidak boleh menjadikan masalah sumber daya alam sebagai beban yang harus di selesaikan oleh pemerintah saja, melainkan harus ada kerja sama yang sistematis dan progresif antara pemerintah dengan masyarakat.

- e. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Kota Jakarta merupakan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kota metropolitan, pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa sehingga memberikan daya tarik yang besar pada masyarakat untuk datang ke Jakarta sekedar mengadu nasib atau menikmati keindahan kotanya, yang pada akhirnya banyak masalah lingkungan yang terjadi.

Permasalahan sosial masyarakat yang tertinggi adalah penyakit masyarakat seperti banyaknya warga Jakarta yang membuang sampah di sungai, mencuci, memasak, aktivitas mandi dan buang hajat pun dilakukan di sungai;

pedagang kaki lima; kawasan kumuh; pengangguran; kriminalitas; ledakan penduduk dan urbanisasi.

Semakin kompleksnya permasalahan sosial yang timbul, menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat perkotaan sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya, antara lain dengan perubahan paradigma terhadap pengelolaan lingkungan hidup, sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta diikuti perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang bertanggungjawab terhadap lingkungannya.

f. Percepatan Pencapaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Isu pemanasan global merupakan isu penting di tingkat internasional yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK) dari aktivitas manusia terutama dalam penggunaan bahan bakar fosil, dan alih guna lahan dan hutan.

Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim ekstrim yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan, seperti tanah longsor, kekeringan, gagal tanam dan panen, meluapnya air laut ke darat (rob), kebakaran hutan, yang berpengaruh pada keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Perubahan iklim dapat diantisipasi dengan berbagai upaya adaptasi dan mitigasi, antara lain dengan mengurangi sumber-sumber penghasil emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan karbon. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebanyak 26% dari *Business as Usual* (BAU) pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional, dan penurunan sebanyak 29% pada tahun 2030.

Jakarta merupakan salah satu kota pesisir yang berisiko tinggi terdampak perubahan iklim, antara lain kondisi lingkungan dan biofisik wilayah Jakarta yang semakin memburuk sehingga tingkat kerentanan semakin meningkat, dan tingkat keterpaparan dan sensitivitas meningkat, terutama akibat penurunan muka tanah, peningkatan kepadatan penduduk, kemampuan pengelolaan sampah yang tidak seimbang dengan laju timbunan, kapasitas drainase yang tidak memadai, dan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau.

Dalam hal ini, Jakarta telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 30% pada tahun 2030 berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Sedangkan, aksi-aksi adaptasi perubahan iklim didasarkan pada Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil perhitungan dari aktivitas penghasil emisi gas rumah kaca, maka diperoleh tingkat emisi gas rumah kaca Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2012 – 2016 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel III.5 Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 (dalam satuan Gg CO₂e)

Sumber Emisi	2012	2013	2014	2015	2016
RTH (serapan)	(422.78)	(423.28)	(424.94)	(424.94)	(671.34)
Direct (kecuali industri energi)	19,781.92	23,471.84	17,521.08	15,206.51	15,877.68
Industri Energi (pembangkit)	6,684.64	6,352.22	6,047.18	7,494.62	7,032.52
Indirect (penggunaan listrik Jawa Madura Bali)	31,938.15	37,301.42	38,050.02	33,512.47	33,512.47
Limbah	1,935.22	2,023.12	2,086.70	2,157.04	1,967.30
Total	60,339.92	69,148.60	63,704.97	58,370.64	57,718.63

Penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan dalam berbagai bidang, yaitu: (a) rumah tangga, (b) transportasi, (c) industri, (d) komersial, (e) lampu penerangan jalan umum, (f) limbah, dan (g) ruang terbuka hijau. Hasil perhitungan capaian penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2016 sebesar 4.786,327 ton CO₂ atau sebesar 13% dari target tahun 2030.

Berdasarkan laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK) tahun 2017, maka aksi-aksi mitigasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2012-2016 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.6 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Aksi Mitigasi	Pelaporan PEP aksi mitigasi (ton CO ₂ e)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Penerangan Jalan Umum Lampu Hemat Energi (PJU LHE)	50	1.293	11.556	20.314	28.519
Penerangan Jalan Umum Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PJU PLTS)	26	54	10	10	111
PLTS Gedung Pemerintah dan Sekolah	1	24	80	88	85
PLTS Pulau Sebira	4	69	62	60	59
Busway / Bus Rapid Transit	83.933	207.166	333.835	162.943	32.214
Feeder Busway	n.a	n.a	n.a	10.265	48.562
Intelligent Transport System (ITS)	34.405	34.405	27.424	5.940	-
Kereta Rel Listrik	n.a	n.a	n.a	241.059	148.107
Efisiensi Energi Gedung Pemerintahan	n.a	n.a	32.446	35.831	4.601
Bangunan Hijau	6.809	8.090	11.913	13.789	14.388
Penggunaan Gas Engine Bangunan Komersial	n.a	n.a	n.a	21.504	19.262
Penurunan Own-use Pembangkit Listrik	n.a	n.a	n.a	n.a	49
Peningkatan Efisiensi Pembangkit Listrik	n.a	n.a	n.a	n.a	3.711.837
Landfill Gas	276.690	197.557	117.348	67.785	48.195
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8.456	1.494	653.05	741.3	671.34
Biodiesel	114.975	179.645	n.a	n.a	n.A
LPG	1.845.185	1.894.197	n.a	n.a	n.A
Komposting	n.a	n.a	7.698	18.890	27.377
Sentra 3R	n.a	n.a	96.096	22.830	29.155
IPLS (Duri Kosambi dan Pulo Gebang)	n.a	n.a	n.a	n.a	606
IPAL / Waduk Setiabudi	n.a	n.a	n.a	n.a	1.849
TOTAL	2.370.534	2.523.994	1.291.518	1.362.608	4.786.327

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, serta menangani permasalahan strategis, tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Peningkatan kinerja dan cakupan pelayanan penanganan sampah
2. Pengurangan sampah di kota
3. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersaji dalam tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah	Peningkatan kinerja dan cakupan pelayanan penanganan sampah	Jumlah TPS 3R	5 TPS	15 TPS	25 TPS	35 TPS	45 TPS
		Pengurangan sampah di kota	Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA	6.551,89 Ton/hari	-	-	-	-
			Persentase pengurangan timbulan sampah	-	17%	20%	23%	26%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Tingkat Pencemaran Air	34.55	-	-	-	-
			Penurunan Tingkat Pencemaran Udara	40.43	-	-	-	-
			Presentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	40%	-	-	-	-
			Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	10%	-	-	-	-
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	37.14	37.51	37.89	38.27

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa indikator sasaran dan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami penyesuaian pada tahun 2019 sampai 2022 sehingga indikator sasaran yang semula Pengurangan Sampah Yang Dikirim Ke TPA menjadi Persentase Pengurangan Timbulan Sampah. Demikian juga untuk indikator sasaran Penurunan Tingkat Pencemaran Air, Penurunan Tingkat Pencemaran Udara, Presentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan dan Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 disimpulkan menjadi indikator sasaran Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi.

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta

Visi: Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”			
Misi II: Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah	1. Peningkatan kinerja dan cakupan pelayanan penanganan sampah	1. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan	1. Pengaturan pola operasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas 2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
		2. Meningkatkan cakupan pelayanan hingga ke rumah tangga	1. Membuat sistem dan pola pelayanan penanganan sampah hingga ke rumah tangga 2. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah
		3. Modernisasi instalasi pengolahan sampah dalam kota	1. Percepatan pembangunan ITF dalam kota 2. Penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna
		4. Meningkatkan pengolahan sampah dalam kota	1. Pembentukan dan pengembangan TPS menjadi TPS 3R

		5. Peningkatan kinerja pengolahan sampah di TPST Bantargebang	1. Optimalisasi TPST Bantargebang
		6. Meningkatkan cakupan pelayanan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan pola teknis penanganan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) 2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) 3. Pembinaan dan pengawasan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)
	2. Pengurangan sampah di kota	1. Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan potensi sampah 2. Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis 3R dan bank sampah oleh masyarakat 3. Optimalisasi pengolahan sampah organik oleh masyarakat 4. Pengembangan peluang usaha di bidang persampahan
		2. Penguatan komitmen dan peran serta instansi dan dunia usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan bahan kemasan yang dapat digunakan kembali, bahan yang dapat di daur ulang dan yang mudah diurai oleh proses alam oleh pelaku usaha dan produsen 2. Mendorong pengelola dunia usaha, pasar dan pemukiman untuk mengurangi sampah 3. Menerapkan seluas-luasnya potensi EPR dan CSR dalam pengelolaan sampah 4. Melaksanakan pengurangan sampah makanan 5. Pengurangan sampah sekolah dan kantor (penerapan eco office)

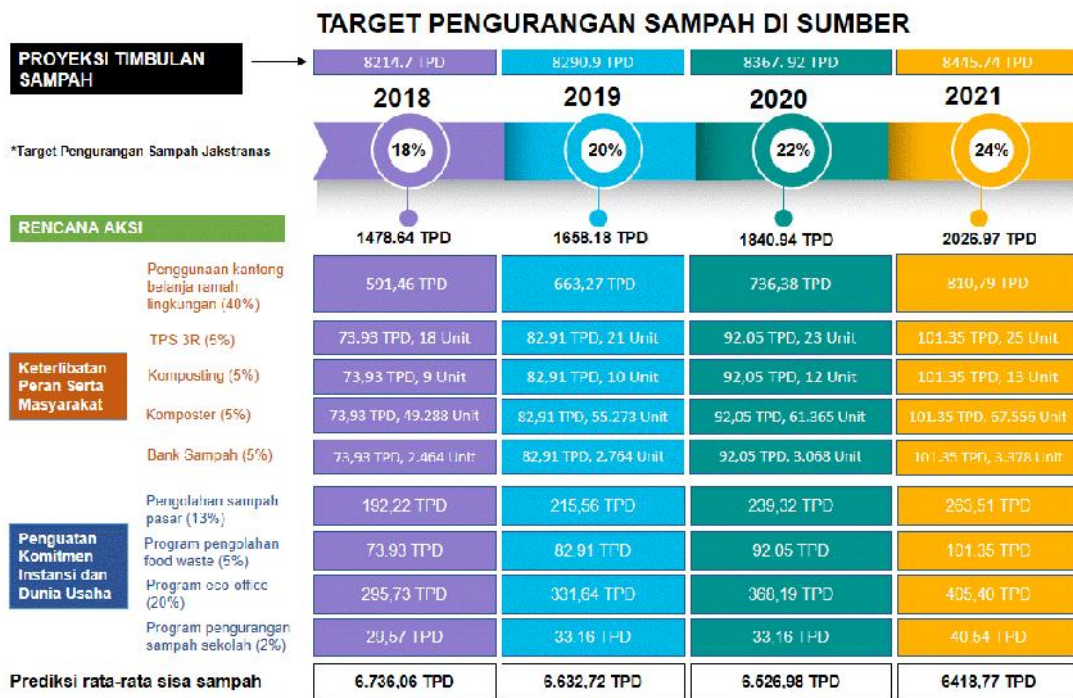
Misi IV :Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupanyangmemperkuat daya dukung lingkungan dan sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Mengintegrasikan upaya pencegahan pencemaran melalui kebijakan	2. Penetapan Kebijakan Lingkungan Hidup 3. Peningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan
		2. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup	1. Peningkatan pemantauan dan pengendalian lingkungan terhadap sumber pencemar 2. Penguatan pengawasan dan penataan hukum secara konsisten 3. Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan hidup
		3. Penguatan pengaturan emisi kendaraan bermotor	1. Penguatan aturan uji emisi kendaraan bermotor dan implementasinya 2. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembatasan penggunaan kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan
		4. Penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Meningkatkan aksi pelibatan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup
		5. Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam	1. Penguatan kebijakan perlindungan sumber daya alam 2. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam 3. Pengendalian kerusakan lingkungan
		6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Peningkatan pengendalian dan koordinasi dalam upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim

		<p>7. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>1. Pengembangan kinerja dan kapasitas laboratorium 2. Peningkatan kuantitas dan kompetensi sumberdaya manusia 3. Peningkatan pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup</p>
--	--	---	---

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Secara garis besar tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup terutama dalam hal pengurangan sampah akan dicapai melalui upaya-upaya dalam Gambar 6.1

Gambar VI.1
Upaya-upaya Pengurangan Sampah di Sumber



Upaya-upaya tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta antara lain:

- I. Program Pengelolaan Persampahan yang antara lain didukung oleh kegiatan:
 1. Pembuatan Peraturan Pembatasan Penggunaan Plastik dan Styrofoam
 2. Pengawasan Pembatasan Penggunaan Plastik dan Styrofoam
 3. Pengembangan Aplikasi e-Bank Sampah
 4. Pemberdayaan Usaha dan Produk Daur Ulang Ramah Lingkungan
 5. Pengembangan dan pendampingan Bank Sampah
 6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Bank Sampah
 7. Pengadaan sarana dan prasarana composting

8. Peningkatan pengolahan sampah di TPS
9. Peningkatan TPS
10. Pemeliharaan TPS
11. Pemeliharaan Alat Pemusnah Sampah
12. Penilaian Program Adipura
13. Pengelolaan Lingkungan Bersih, Hijau dan Sehat
14. Pelaksanaan Program Sekolah Adiwiyata
15. Pengadaan Tong Sampah Pilah
16. Penguatan Peran Dunia Usaha dalam Program EPR/CSR Lingkungan
17. Sosialisasi pengurangan sampah dunia usaha/pengelola kawasan
18. Monitoring pengurangan sampah dunia usaha/pengelola kawasan
19. Kampanye No Food Waste
20. Pengadaan Alat Biopori dan kelengkapannya
21. Monitoring dan evaluasi Lubang Resapan Biopori
22. Pembayaran Tipping fee pengelolaan ITF
23. Penanganan kebersihan dengan pekerja kontrak perorangan
24. Pengadaan Angkutan sampah
25. Pengadaan Road Sweeper
26. Pengadaan Wheel Loader
27. Pengadaan Alat Berat Kebersihan Air
28. Pengadaan Penunjang Penanganan Sampah
29. Covering Landfill TPST Bantargebang
30. Landfill mining
31. Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kota dan Sarana Penunjangnya
32. Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kecamatan dan Sarana Penunjangnya
33. Jasa Pengolahan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga
34. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (Limbah B3)
35. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes Tk Dasar, USK dan Rumah Tangga
36. Penerapan Teknologi Pengelolaan Lingkungan
37. Pembangunan Model Pengelolaan Lingkungan
38. Pemeliharaan Saringan Sampah
39. Pemantauan Kinerja Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta
40. Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah Skala Komunal

II. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Penilaian dokumen lingkungan
2. Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah
3. Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Sungai
4. Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Situ/Waduk
5. Pemantauan Kualitas Lingkungan Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta
6. Pemantauan Kualitas Lingkungan disekitar TPS di DKI Jakarta
7. Penyusunan Bahan Kebijakan Pembinaan Terhadap Usaha Skala Kecil
8. Inventarisasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan
9. Pemulihan Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
10. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan air limbah
11. Pemeliharaan Prasarana Sarana Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
12. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
13. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim
14. Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim)
15. Pemantauan Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan
16. Pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)
17. Pemantauan Kualitas Lingkungan Udara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB)
18. Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor
19. Pengawasan pengelolaan pencemaran udara sumber emisi tidak bergerak
20. Pengadaan Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor
21. Pemeliharaan dan Perawatan Stasiun Pemantau Kualitas Udara di 5 Wilayah Kota Administrasi dan 1 SPKU bergerak
22. Pengadaan Suku Cadang Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU)
23. Pengadaan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU)
24. Pengelolaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian Terakreditasi
25. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam
26. Masterplan Pengelolaan Lingkungan Hidup
27. Implementasi dan Monitoring Masterplan Pengelolaan Lingkungan Hidup
28. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan lingkungan hidup

29. Penyusunan kebijakan penataan pengelolaan lingkungan hidup
30. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
31. Pemantauan dan evaluasi KLHS
32. Evaluasi RPPLH
33. Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta
34. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
35. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Lingkungan dan Kebersihan
36. Monitoring dan pengawasan penerapan teknologi pengelolaan lingkungan dan kebersihan
37. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan
38. Pelayanan Toilet Berjalan untuk Penanganan Event-Event Insidental
39. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan
40. Penyediaan Sarana dan Prasarana Edukasi, Sosialisasi dan Bimbingan
41. Pembuatan Media Audio Visual Edukasi Lingkungan Hidup
42. Informasi, Komunikasi dan Publikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Pameran Lingkungan dan Kebersihan)
43. Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan
44. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup dan Kebersihan
45. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (dokumen lingkungan)
46. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
47. Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
48. Penegakan hukum lingkungan
49. Operasi Tangkap Tangan Pelanggaran Lingkungan Hidup dan Kebersihan

III. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup

1. Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)
2. Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor
3. Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor
4. Penyediaan makanan dan minuman rapat
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan sewa mesin foto copy
8. Penyediaan jasa administrasi keuangan

9. Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah
10. Tes Narkoba Pekerja Kontrak Perorangan
11. Pengendalian Hama (Pest Control) Kantor Dinas Lingkungan Hidup
12. Peningkatan wawasan pengelolaan lingkungan dan kebersihan
13. Pengeloaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
14. Penyediaan Jasa Penerapan Jaminan Mutu Laboratorium
15. Pengisian Tabung Gas Peralatan Laboratorium
16. Penyediaan Ekstra Fooding
17. Pengadaan Gergaji Mesin
18. Pengadaan Mesin Potong Rumput
19. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja
20. Pengadaan Prasarana dan Sarana Kerja
21. Pengadaan Perlengkapan Pendukung Command Center Lingkungan Hidup
22. Perpanjangan Paket Pulsa GPS Tracker KDO/KDO Khusus
23. Penyediaan Aplikasi Berbasis Web dan Android
24. Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor
25. Pemeliharaan Sarana Prasarana Asrama Dinas Lingkungan Hidup
26. Pengadaan/ Pembangunan Sarana Prasarana Gedung Kantor
27. Pengelolaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
28. Peningkatan Wawasan Pengelolaan Lingkungan dan Kebersihan

IV. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup

1. Pemeliharaan Kendaraan Operasional Road Sweeper (ATPM)
2. Pemeliharaan Kendaraan Operasional Bermotor Truck (ATPM)
3. Pemeliharaan Kendaraan Operasional Perkantoran (ATPM)
4. Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor Dinas Operasional Melalui ATPM
5. Pemeliharaan Gerobak Motor
6. Pemeliharaan Alat Berat Kebersihan
7. Pengadaan Suku Cadang Kapal dan Pemeliharaan Kapal
8. Penyediaan BBM KDO / KDO Khusus
9. Penyediaan Jasa Jalan Tol
10. Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus
11. Pengadaan Ban KDO/KDO Khusus
12. Pengadaan Accu KDO / KDO Khusus
13. Pengadaan Forklift

14. Pengadaan Kapal Operasional Lingkungan Hidup
15. Pengadaan Mobil Derek
16. Pengadaan Self Loader
17. Pengadaan Sepeda Motor Operasional
18. Pengadaan Sepeda Patroli
19. Pengadaan Radio Trunking
20. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dinas Lingkungan Hidup
21. Pengadaan Generator Set (Genset)
22. Pembuatan Sumur Resapan Kantor Dinas Lingkungan Hidup
23. Pembuatan Sumur Dalam (Pantek) Kantor Dinas Lingkungan Hidup

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan padalampiran 2.

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akandicapai Dinas Lingkungan Hidup n dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini.

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR
		Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA	6.645,24 ton/hari	6551,89 ton/hari	-	-	-	-	6551,89 ton/hari
2	Pengurangan sampah di kota	13.08%	-	17%	20%	23%	26%	26%
3	Penurunan Tingkat Pencemaran Air	33.65	34,55	-	-	-	-	34,55
4	Penurunan Tingkat Pencemaran Udara	40,23	40,43	-	-	-	-	-
5	Persentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	0%	10%	20%	30%	40%	60%	60%
6	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	30%	40%	-	-	-	-	-
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	36,41	-	37,14	37,51	37,89	38,27	38,27

BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup selama periode 2017-2022.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan rencana tahunan Dinas Lingkungan Hidup selama periode lima tahun, 2017 -2022 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian pencapaian kinerja dan akan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup untuk bersama-sama melangkah dalam tindakan yang harmonis untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis ini. Pencapaian kinerja memang bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, ikhtiar dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memang mampu memenuhi harapan stakeholders.

**TABEL 6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB			
						Target	Rp				
Meningkatkan penanganan dan pengurangan sampah	Peningkatan kinerja dan cakupan pelayanan sampah	1	11	01	Program Pengelolaan Persampahan	Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA	6,551,89 ton/hari	1,495,200,950,825	Dinas, Sudin, UPK BA, UPST		
					1	Penanganan kebersihan dengan pekerja kontrak perorangan	Jumlah orang yang menangani kebersihan dengan kontrak perorangan	10,196 orang	12.464 orang	772,362,629,545	Bid. PK, Sudin, UPK BA, UPST
					2	Penyedia Jasa Tes NARKOBA	Jumlah PJLP yang menjalani tes narkoba	-	400 orang	61,600,000	UPK BA
					3	Penyediaan Jasa Jalan Tol	Jumlah kendaraan yang menggunakan jasa jalan tol	2.271 unit	2.289 unit	11,736,244,720	Bid. PK, Sudin Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur, UPK BA
					4	Pengadaan Truck Compactor	Jumlah truck compactor sampah yang tersedia	75 unit	36 unit	44,471,849,752	Bid. Prasar
					5	Pengadaan Alat Angkut Kebersihan Gerobak Motor	Jumlah gerobak motor yang tersedia	1.000 unit	500 unit	27,500,000,000	Bid. Prasar
					6	Pengadaan Dump Pick Up	Jumlah Dump Pick Up yang tersedia	26 unit	26 unit	4,528,062,000	UPK BA
					7	Pengadaan Kendaraan Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang tersedia	-	12 unit	1,281,335,660	UPST
					8	Pengadaan Wheel Loader	Jumlah wheel loader yang tersedia	5 unit	8 unit	16,720,000,000	Bid. Prasar
					9	Pengadaan Alat Berat Kebersihan Air	Jumlah alat berat kebersihan air yang tersedia	158 unit	2 unit, 3 attachment	11,069,055,745	UPK BA
					10	Pengadaan Alat Berat	Jumlah alat berat yang tersedia	-	15 unit	43,393,625,000	UPST
					11	Pengadaan Tong Sampah	Jumlah tong sampah yang disediakan	8.561 unit	4.940 unit	18,521,790,650	Bid. Prasar, Sudin Pusat, Utara, Barat & Timur
					12	Pengadaan Tempat Sampah Pilah Jepit	Jumlah tempat sampah pilah jepit yang	-	1.000 unit	1,361,250,000	Bid. Prasar
					13	Pengadaan Kontainer Kebersihan	Jumlah kontainer kebersihan yang	20 unit	30 unit	1,489,252,875	Sudin Utara
					14	Pengawasan Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan	Jumlah retail yang diawasi	-	50 lokasi	116,350,000	Bid. PK
					15	Pengadaan penunjang kebersihan	Jumlah peralatan penunjang kebersihan yang disediakan	-	659 unit	952,731,650	Sudin Barat, Selatan, Timur dan Kep. Seribu
			16	Pengadaan Gerobak Sampah	Jumlah pengadaan gerobak sampah	560 unit	197 unit	739,693,955	Bid. Prasar, Sudin Utara, Barat & Timur		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	
						Target	Rp		
			17	Pengadaan Papan Himbauan	Jumlah pengadaan papan himbauan	34 buah	34 buah	196,237,800	Sudin Timur
			18	Pengadaan Penghilang Bau Sampah	Jumlah pengadaan penghilang bau sampah	-	2508 L	187,598,400	Sudin Timur
			19	Pengadaan Perlengkapan Pendukung Operasional PNS	Jumlah pengadaan perlengkapan pendukung operasional PNS	-	36 set	97,871,400	UPK BA
			20	Pengadaan Kantong Sampah Plastik	Jumlah pengadaan kantong sampah plastik	20.660 buah	64.380 buah	2,478,630,000	Bid. Prasar, Sudin
			21	Pengadaan Terpal dan Jaring Sampah	Jumlah pengadaan terpal dan jaring sampah	5.362 unit	5.744 unit	3,865,301,374	Bid. Prasar, Sudin, UPK BA
			22	Pengadaan Penyekat Sampah	Jumlah penyekat sampah yang disediakan	15.984 unit	10.226 unit	22,222,255,000	UPK BA
			23	Pengadaan Ponton Sampah Sungai/Kali	Jumlah ponton sampah sungai/kali yang disediakan	19 unit ponton	1.588 unit kubus hdpe	3,450,920,000	UPK BA
			24	Pemeliharaan Saringan Sampah	Jumlah saringan sampah yang dipelihara	-	26 unit	77,325,170,036	UPK BA
			25	Pengadaan Perahu Karet	Jumlah perahu karet yang disediakan	-	20 Unit	594,000,000	UPK BA
			26	Pengadaan Pos Mobile	Jumlah pos mobile yang disediakan	-	42 Unit	2,156,220,000	UPK BA
			27	Pengadaan Dermaga Apung	Jumlah dermaga apung yang disediakan	-	11.526 unit kubus hdpe = 127 dermaga apung	25,047,000,000	UPK BA
			28	Penerapan Teknologi Pengelolaan Lingkungan	Jumlah teknologi pengelolaan sampah skala komunal yang dikembangkan	-	3 teknologi	229,651,568	Bid. PSM
			29	Pembangunan Model Pengelolaan Lingkungan	Jumlah teknologi yang diterapkan	-	1 model	610,836,244	Bid. PSM
			30	Pemberdayaan Usaha dan Produk Daur Ulang Ramah Lingkungan	Jumlah kegiatan pameran produk daur ulang ramah lingkungan	-	2 kegiatan	750,432,040	Bid. PSM
			31	Pengembangan Aplikasi e-Bank Sampah Berbasis Android	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	-	1 aplikasi	130,505,200	Bid. PSM
			32	Peningkatan Pengolahan Kualitas Kompos	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kualitas kompos	60 orang	150 orang	141,123,640	Bid. PSM
			33	Pengadaan sarana dan prasarana komposting	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana komposting	300 unit	352 unit	520,224,144	Sudin Pusat, Utara & Timur
			34	Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah	Jumlah bank sampah yang terbentuk	742 bank sampah	300 bank sampah	872,138,700	Bid. PSM
			35	Penyediaan Prasarana dan Sarana Bank Sampah	Jenis prasarana dan sarana bank sampah yang disediakan	6 jenis	4 jenis	1,199,382,393	Sudin

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	
			36 Pembangunan Bank Sampah Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jumlah bank sampah yang dibangun	1 Bank Sampah	1 Bank Sampah	2,195,988,974	Sudin Pusat
			37 Pembangunan Bank Sampah Satuan Pelaksana Kec. Tanah Abang	Jumlah bank sampah yang dibangun	-	1 Bank Sampah	387,641,450	Sudin Pusat
			38 Pelaksanaan Program Adiwiyata	Jumlah sekolah yang melaksanakan program adiwiyata	56 sekolah	120 sekolah	486,448,332	Bid. PSM dan Sudin Barat
			39 Pembuatan Media Audio Visual Edukasi Lingkungan Hidup	Jumlah video sebagai media edukasi yang dibuat	-	5 video	445,199,710	Bid. PSM
			40 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jenis/kategori penghargaan	-	4 kategori	370,888,934	Sudin Utara, Barat
			41 Penyediaan Mesin Pencacah	Jumlah mesin pencacah yang disediakan	-	10 unit	211,200,000	Sudin Selatan
			42 Pendampingan Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber	Jumlah peserta pendampingan	50 orang	50 orang	74,393,000	Sudin Selatan
			43 Edukasi kebersihan dan lingkungan	Jenis/kategori edukasi	-	4 jenis	898,367,233	Sudin Pusat, Timur
			44 Peningkatan kualitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Jumlah dokumen peningkatan TPS	-	1 dokumen	228,450,000	Bid. TLK
			45 Pembangunan tempat pengolahan sampah ramah lingkungan	Jumlah TPS yang dibangun	3 TPS	2 TPS	3,074,009,801	Pusat
			46 Peningkatan TPS	Jumlah TPS yang ditingkatkan	15 TPS	34 TPS	17,908,538,036	Sudin Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur
			47 Penilaian Program Adipura	Jumlah Kota/kabupaten yang masuk Penilaian Program Adipura	5 kota	5 kota & 1 kabupaten	191,956,000	Bid. PSM
			48 Pengelolaan Lingkungan Bersih, Hijau dan Sehat	Jumlah Kota/kabupaten yang masuk Penilaian Program Adipura	2 kota	2 kota	601,950,216	Sudin Utara & Barat
			49 Pembinaan Komunitas Masyarakat Peduli Lingkungan	Jumlah komunitas yang dibina	-	6 komunitas	244,547,072	Sudin Kep. Seribu
			50 Operasi Tangkap Tangan Pelanggaran Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah kegiatan Operasi Tangkap Tangan	99 kegiatan	1.190 kegiatan	239,959,500	Bid. PPH
			51 Pemantauan Kinerja Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta	Jumlah aspek yang dipantau	-	5 aspek	68,250,000	Bid. PK
			50 Penyediaan Sarana dan Prasarana Edukasi, Sosialisasi dan Bimbingan.	Jenis sarana dan prasarana edukasi yang	-	11 jenis	568,232,760	Bid. PSM
			52 Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan.	Jenis penghargaan yang diberikan kepada	5 jenis	5 jenis	143,400,760	Bid. PSM
			53 Kampung Iklim dan Kalpataru	Jumlah RW yang melakukan program kampung iklim	-	4 RW	302,277,184	Sudin Kepulauan Seribu
			54 Pemeliharaan Alat Pemusnah Sampah	Jumlah alat pemusnah sampah yang dilakukan pemeliharaan	-	16 unit	1,022,752,781	Sudin Kepulauan Seribu

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	
			55 Penyediaan BBM KDO / KDO Khusus	Jumlah BBM yang disediakan	17.942.019 L	16.297.967 L	142,953,000,080	Bid. Prasar, Sudin Pusat, Selatan, Timur, UPK BA
			56 Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Jumlah kendaraan yang diperpanjang ijinnya	39 unit	154 unit	265,491,050	UPK BA
			57 Asuransi Kendaraan	Jumlah kendaraan dan alat berat yang diperpanjang asuransinya	-	414 unit	2,186,317,293	UPK BA
			58 Pengadaan Ban KDO/KDOK	Jumlah pengadaan ban KDO/KDOK	15,136 buah	20.016 buah	36,488,018,248	Sudin Pusat, Barat, Timur, UPST
			59 Pengadaan Accu KDO/KDO Khusus	Jumlah pengadaan accu KDO/KDO khusus	1 paket	768 buah	1,008,684,967	Sudin Timur
			60 Pemeliharaan Alat Berat	Jumlah alat berat yang dilakukan pemeliharaan	262 unit	340 unit	47,667,739,321	Sudin Pusat, Barat, Selatan & Timur, UPK BA, UPST
			61 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Road Sweeper (ATPM)	Jumlah road sweeper yang dilakukan pemeliharaan	6 unit	12 unit	5,748,773,030	Bid.Prasar, Sudin Pusat & Timur
			62 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Bermotor Truck (ATPM)	Jumlah pemeliharaan yang dilakukan	1.267 unit	1.617 unit	51,354,932,286	Bid. Prasar, Sudin Pusat, Barat, Timur dan UPK BA
			63 Pemeliharaan Gerobak Motor	Jumlah gerobak motor yang dilakukan pemeliharaan	588 unit	545 unit	1,496,577,366	Sudin Pusat, Barat, Selatan & Timur
			64 Pemeliharaan Sepeda Motor	Jumlah sepeda motor yang dilakukan pemeliharaan	95 unit	72 unit	118,800,000	Sudin Barat & Timur
			65 Pemeliharaan Jalan Operasional TPST Bantargebang	Luas jalan operasional TPST Bantargebang yang dilakukan pemeliharaan	3,080 m ²	2319 m ²	33,416,790,000	UPST
			66 Pemeliharaan Jembatan dan Gorong-gorong di Areal TPST Bantargebang	Luas jembatan dan gorong-gorong yang dilakukan pemeliharaan	-	200 m	1,353,000,000	UPST
			67 Pemeliharaan Car Washing	Jumlah car wash yang dilakukan pemeliharaan	-	1 unit	204,430,600	UPST
			68 Pemeliharaan Drainase TPST Bantargebang	Jumlah u-ditch yang dilakukan pemeliharaan	-	5.647 unit	5,002,705,469	UPST
			69 Covering Landfill	Luasan area covering landfill	109,000 m ² Geo-membran	17,330 m ² Geo-membran	15,626,438,182	UPST
			70 Pengolahan Kompos TPST Bantargebang	Volume hasil pengolahan kompos TPST	1 Paket	1 Paket	497,998,398	UPST

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	
						Target	Rp		
			71	Pemeliharaan Jembatan Timbang	Jumlah jembatan timbang yang dilakukan pemeliharaan	1 unit	2 unit	113,968,063	UPST
			72	Jasa Pendampingan Pengelolaan Sampah	Jumlah tenaga ahli pendampingan pengelolaan sampah	16 orang	148 orang	2,833,262,418	UPST
			73	Pembangunan Jembatan Timbang dan Pos	Jumlah jembatan timbang dan pos yang dibangun	-	1 jembatan, 2 pos jaga	2,000,012,974	UPST
			74	Pembangunan Jalan di Atas Zona TPST Bantargebang	Luas jalan yang dibangun	-	2.200 m ²	3,858,647,892	UPST
			75	Pembangunan Dinding Penahan di TPST Bantargebang	Panjang dinding penahan yang dibangun	-	477,5 m	10,005,049,689	UPST
			76	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sampah Skala Komunal	Jumlah teknologi pengelolaan sampah skala komunal yang dikembangkan	-	1 teknologi	214,850,530	Bid. TLK
			77	Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan PLTSa/ ITF	Jumlah dokumen Pra Studi Kelayakan Pembangunan PLTSa/ ITF yang disusun	-	1 dokumen	2,801,641,735	Bid. TLK
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air dan Udara	1 11 02	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Tingkat Pencemaran Air		34.55	33,553,878,260	Dinas, Sudin, UPT LLHD, UPST	
			1	Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah	Jumlah titik pemantauan kualitas air tanah	267 titik	267 titik	417,714,000	Bid. PDL
			2	Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Sungai	Jumlah titik pemantauan kualitas air sungai	90 titik	90 titik	336,030,000	Bid. PDL
			3	Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Situ/Waduk	Jumlah titik pemantauan kualitas air situ/waduk	40 situ/ waduk	40 situ/ waduk	254,430,000	Bid. PDL
			4	Pemantauan Kualitas Lingkungan Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta	Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan perairan laut dan muara Teluk Jakarta	45 titik	45 titik	404,384,578	Bid. PDL
			5	Inventarisasi Kerusakan Lingkungan di Kelurahan Pulau Panggang	Baku kerusakan yang diinventarisasi	-	3 kerusakan	256,137,200	Bid. PDL
			6	Penyusunan Bahan Kebijakan Pembinaan Terhadap Usaha Skala Kecil	Jumlah kebijakan terhadap usaha skala kecil yang disusun	-	3 kebijakan	59,200,000	Bid. PDL
			7	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (air limbah)	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi	534 kegiatan usaha	1.085 kegiatan usaha	184,100,000	Bid. PPH, Sudin Pusat, Sudin Timur
			8	Penanganan Pengaduan Pencemaran dan Sengketa Lingkungan	Persentase pengaduan pencemaran dan sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	100%	340,520,370	Bid. PPH, Sudin
			9	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah penegakan hukum lingkungan	321 sanksi	1.440 sanksi	165,000,000	Bid. PPH

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	
			10 Pengadaan Prasarana Sarana Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan	Jumlah pengadaan prasarana dan sarana pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan	-	5 items	2,030,095,650	Bid. Prasar
			11 Pengadaan Truk Tangki Air Kotor Kecil	Jumlah truk tangki air kotor kecil yang disediakan	-	9 unit	4,236,732,126	Bid. Prasar
			12 Pengadaan Truk Tangki Air Bersih	Jumlah truk tangki air bersih yang disediakan	-	7 unit	3,295,236,098	Bid. Prasar
			13 Pengadaan Truk Tangki Penyedot Air Leachate dari TPS	Jumlah truk tangki penyedot air leachate yang disediakan	-	7 unit	3,295,236,098	Bid. Prasar
			14 Pelayanan Toilet Berjalan untuk Penanganan Event-Event Insidental	Jumlah event yang dilayani dalam setahun	120 event	120 event	459,102,816	Bid. PK
			15 Pengadaan Alat Biopori	Jumlah pengadaan alat biopori	-	800 buah	187,753,632	Sudin Pusat, Selatan
			16 Pembinaan Pengelolaan Limbah Usaha Kecil Menengah di Kepulauan Seribu	Jumlah usaha skala kecil menengah yang dibina	-	25 kegiatan usaha	35,127,400	Sudin Kep. Seribu
			17 Pengolahan Air Limbah dan Pemeliharaan IPAL Laboratorium	Jumlah IPAL yang dilakukan pemeliharaan	1 unit	1 unit	87,120,000	UPT LLHD
			18 Pengadaan Bahan Kimia dan Standard Reference Material (SRM)	Jumlah bahan kimia dan Standard Reference Material (SRM)	123 jenis	120 jenis	1,580,600,594	UPT LLHD
			19 Pengadaan Suku Cadang Peralatan Laboratorium	Jumlah suku cadang peralatan laboratorium	11 alat	10 alat	963,723,062	UPT LLHD
			20 Pengadaan Peralatan Laboratorium	Jumlah peralatan laboratorium	5 alat	4 alat	3,803,176,036	UPT LLHD
			21 Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium	Jumlah peralatan laboratorium yang dikalibrasi dan dilakukan pemeliharaan	30 alat	20 alat	369,476,800	UPT LLHD
			22 Pengelolaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian Terakreditasi	Jumlah dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian Terakreditasi	5 dokumen	5 dokumen	123,351,402	UPT LLHD
			23 Pengolahan Air Sampah TPST Bantargebang (IPAS)	Volume air sampah yang diolah di IPAS Bantargebang	575 m3	575 m3	3,122,530,398	UPST
			24 Peningkatan Teknologi IPAS	Jumlah IPAS yang ditingkatkan	-	1 unit	5,743,100,000	UPST
			25 Pengadaan Toilet Portable	Jumlah toilet portable yang diadakan	-	20 unit	1,804,000,000	Bid. Prasar
		1 11 02	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Tingkat Pencemaran Udara		40.43	27,857,301,482	Dinas, Sudin, UPT LLHD, UPST
			1 Inventarisasi dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta	Jumlah sektor yang diinventarisasi	-	7 sektor	312,390,000	Bid. TLK

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	
			2 Pelaporan, Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan capaian reduksi emisi gas rumah kaca dari aksi-aksi pengendalian dampak perubahan iklim	-	11%	315,990,000	Bid. TLK
			3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah sektor yang di monitor dan evaluasi	-	6 sektor	283,440,000	Bid. TLK
			4 Pemantauan Kualitas Lingkungan disekitar TPST Bantar Gebang dan SPA Sunter	Frekuensi pemantauan TPST Bantar Gebang SPA Sunter dan TPS di DKI Jakarta	2 kali	2 kali	233,673,250	Bid. PDL
			5 Pemantauan Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan	Jumlah titik pemantauan	-	25 titik	81,900,000	Bid. PDL
			6 Pemantauan Kualitas Lingkungan Udara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB)	Jumlah titik pemantauan	5 titik	5 titik	700,000,400	Sudin
			7 Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah kendaraan yang diuji	13.575 kendaraan	23.000 kendaraan	1,051,251,395	Bid. PDL, Sudin
			8 Pengadaan Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor	Jumlah pengadaan alat uji emisi kendaraan bermotor	-	16 unit	1,173,829,250	Bid. Prasar
			9 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (emisi tidak bergerak)	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan pencemaran udara sumber emisi tidak bergerak	170 kegiatan usaha	550 kegiatan usaha	371,120,000	Bid. PPH, Sudin Pusat, Timur
			10 Pemeliharaan dan Perawatan Stasiun Pemantau Kualitas Udara di 5 Wilayah Kota Administrasi dan 1 SPKU bergerak	Jumlah SPKU yang dilakukan pemeliharaan	6 SPKU	6 SPKU	454,491,600	UPT LLHD
			11 Pengadaan Suku Cadang Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU)	Jenis suku cadang stasiun pemantau kualitas udara	24 jenis	30 jenis	2,908,626,600	UPT LLHD
			12 Pengadaan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU)	Jumlah pengadaan SPKU yg disediakan	-	2 unit mobile, 1 unit penderek	17,969,380,000	UPT LLHD
			13 Pengolahan Gas Methane TPST Bantargebang	Volume gas methane yang diolah di TPST Bantargebang	-		2,001,208,987	UPST
		1 11 02	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3		10%	7,138,414,583	Dinas, Sudin, UPT LLHD
			1 Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kota dan Sarana Penunjangnya	Jumlah TPS Limbah B3 Skala Kota yang dibangun	-	4 unit	1,406,708,591	Bid. PK

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	
			2 Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kecamatan dan Sarana Penunjangnya	Jumlah TPS Limbah B3 Skala Kota yang dibangun	-	5 unit	1,175,332,680	Bid. PK
			3 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 (Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3)	Jumlah TPS Limbah B3 yang dibangun	-	1 unit	176,105,082	Sudin Pusat
			4 Jasa Pengolahan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga	Volume Pengolahan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga	-	15.000 kg padat; 1.000L liquid	622,000,000	Bid. PK
			5 Pengadaan Alat Angkut Limbah B3 Gerobak Motor	Jumlah gerobak motor Limbah B3 yang tersedia	-	44 unit	1,866,062,000	Bid. Prasar
			6 Pengadaan Alat Angkut Limbah B3 Truk Box	Jumlah truk box Limbah B3 yang tersedia	-	5 unit	1,360,029,110	Bid. Prasar
			7 Pengadaan Drop Box e-Waste	Jumlah drop Box e-waste yang tersedia	-	60 unit	79,860,000	Bid. Prasar
			8 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (Limbah B3)	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pelaksanaan bidang lingkungan hidup (Limbah B3)	203 kegiatan usaha	535 kegiatan usaha	252,007,120	Bid. PPH, Sudin Pusat, Timur
			Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (Limbah B3)				167,397,120	
			Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (Limbah B3)		-	80	9,000,000	Pusat
			Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (Limbah B3)				75,610,000	
			9 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan/Usaha Skala Kecil dan Fasyankes Tingkat Dasar	Jumlah Usaha Skala Kecil dan Fasyankes Tingkat Dasar yang dibina dan diawasi	-	25 unit	69,630,000	Sudin Selatan
			10 Penanganan Limbah B3 dan Bahan Kimia Kadaluarsa	Volume Limbah B3 dan Bahan Kimia Kadaluarsa yang ditangani	225 kg padat; 3,500 L liquid	225 kg padat; 3,500 L liquid	130,680,000	UPT LLHD
1	11	02	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan		40%	35,224,710,982	Dinas, Sudin, UPT LLHD
			1 Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Pameran Lingkungan)	Jumlah pameran lingkungan yang diikuti	4 pameran	4 pameran	578,480,779	Bid. PSM

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	
			2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan (Lembaga/Forum Masyarakat, Kalpataru dan Saka Kalpataru)	Jumlah penerima penghargaan (Kalpataru, Lembaga, Forum Masyarakat, Saka Kalpataru)	4 kalpataru, 37 sekolah adiwiyata	15 Orang/komunitas	1,100,601,279	Bid. PSM
			3 Pelaksanaan Program Kampung Iklim	Jumlah RW yang mengikuti Program Kampung Iklim	10 RW	27 RW	1,236,316,323	Bid. PSM, Sudin Pusat, Utara, Barat & Selatan
			4 Pemeliharaan Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah sistem informasi yang terpelihara	-	2 aplikasi	184,640,500	Bid. TLK
			5 Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan dengan GIS	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	-	2 sistem	734,879,292	Bid. TLK
			6 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam	Jumlah komponen sumber daya alam yang dibuat dalam neraca	-	4 komponen	281,100,000	Bid. TLK
			7 Masterplan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Masterplan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	1 dokumen	875,164,956	Bid. TLK
			8 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Laporan dan Buku Resume Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta	-	1 dokumen	288,652,750	Bid. TLK
			9 Penyusunan kebijakan penataan pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	-	1 dokumen	376,449,000	Bid. TLK
			10 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen IKLH Provinsi DKI Jakarta	-	1 dokumen	207,624,912	Bid. TLK
			11 Pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dievaluasi	1 dokumen LKHS	2 dokumen LKHS	313,559,000	Bid. TLK
			12 Evaluasi RPPLH	Jumlah dokumen RPPLH	-	1 dokumen	209,409,000	Bid. TLK
			13 Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta.	Jumlah laporan potensi keanekaragaman hayati	-	1 laporan	279,840,000	Bid. TLK
			14 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.	Dokumen Tingkat kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam	-	1 dokumen	283,440,000	Bid. TLK
			15 Penilaian dokumen lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	73 dokumen	80 dokumen	528,000,000	Bid. PDL

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	
			16 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (dokumen lingkungan)	Persentase pengawasan terhadap implementasi dokumen lingkungan	22%	35%	354,048,625	Bid. PPH, Sudin
			17 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Jumlah kegiatan usaha yang mengikuti peringkat pinerja perusahaan (PROPER)	375 kegiatan usaha	400 kegiatan usaha	151,200,000	Bid. PPH
			18 Pengawasan dampak reklamasi	Laporan pengawasan dampak reklamasi terhadap lingkungan	-	1 dokumen	2,554,443,180	Bid. PPH
			19 Penegakan hukum lingkungan	Jumlah penegakan hukum lingkungan	1.440 sanksi	1.440 sanksi	21,670,000	Bid. PPH
			20 Pengadaan Kendaraan Pemantau dan Pengawas / PPNS	Jumlah pengadaan Kendaraan Pemantau dan Pengawas / PPNS	-	23 unit	23,335,007,850	Bid. Prasar
			21 Pelaksanaan Program Kalpataru	Jumlah kandidat program kalpataru	-	2 orang	16,721,203	Sudin Pusat
			22 Pengelolaan Lingkungan Bersih, Hijau dan Sehat	Jumlah Kota/kabupaten yang masuk Penilaian Program Adipura	2 kota	2 kota	454,447,100	Sudin Pusat, Sudin Selatan
			23 Pelaksanaan Program Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah yang melaksanakan program adiwiyata	-	120 sekolah	338,308,233	Sudin Pusat, Selatan
			24 Review AMDAL TPST Bantargebang	Jumlah dokumen review Amdal	-	1 dokumen	290,400,000	UPST
			25 Pengadaan Obat Penghilang Bau	Jumlah pengadaan obat penghilang bau	-	2.650 L	198,220,000	UPST
			26 Pengisian Tabung Gas Peralatan Laboratorium	Jumlah tabung yang diisi	21 tabung	15 tabung	32,087,000	UPT LLHD
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan perkantoran	Peningkatan kinerja pengelolaan kantor Dinas Lingkungan Hidup	1 11 03	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup	Indeks kepuasan pelayanan kantor		4	91,005,630,681	Dinas, Sudin, UPK BA, UPST, UPT LLHD
			1 Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Pembayaran telepon, air, listrik, internet	12 bulan	12 bulan	21,729,745,792	Dinas, Sudin, UPK BA, UPST, UPT LLHD
			2 Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	148 orang	182 orang	9,859,536,699	Dinas, Sudin, UPK BA, UPT LLHD
			3 Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	92 orang	100 orang	6,177,862,523	Dinas, Sudin, UPT LLHD
			4 Penyediaan Jasa Penerapan Jaminan Mutu Laboratorium	Jumlah tenaga penerapan jaminan mutu laboratorium	16 orang	16 orang	801,500,336	UPT LLHD
			5 Penyediaan alat tulis kantor	Jenis pengadaan alat tulis kantor	200 jenis	200 jenis	1,904,047,614	Dinas, Sudin, UPK BA, UPST, UPT LLHD
			6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	129 jenis	129 jenis	2,139,251,065	Dinas, Sudin, UPK BA, UPST, UPT LLHD
			7 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan materai	2.900 lembar	2.960 lembar	63,437,725	Sudin, UPT LLHD

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	
			8 Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah	Volume air limbah	685 m ³	877 m ³	241,175,000	Subbag Umum, Sudin Pusat, Utara, Barat, Selatan
			9 Pengadaan Makan dan Minum Rapat	Jumlah pengadaan makan dan minum rapat	75.008 boks	75.118 boks	3,279,797,750	Subbag Umum, Sudin, UPK BA, UPST, UPT LLHD
			10 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	110 jenis	110 jenis	384,022,674	Subbag Umum, Sudin Utara, Barat, Timur & Kep. Seribu, UPK BA
			11 Penyediaan sewa mesin foto copy	Jumlah mesin foto copy yang disewa	21 unit	30 unit	1,542,964,896	Dinas, Sudin, UPT
			12 Penyediaan Biaya Balik Nama Lahan	Jumlah lokasi yang akan disertifikasi	-	1 Lokasi	16,850,000	Sudin Pusat
			13 Penyediaan Ekstra Fooding	Jenis penyediaan ekstra fooding	3 jenis	3 jenis	112,538,470	UPT LLHD
			14 Pengadaan Gergaji Mesin	Jumlah pengadaan gergaji mesin	24 unit	10 unit	211,750,000	UPK BA
			15 Pengadaan Mesin Potong Rumput	Jumlah pengadaan mesin potong rumput	13 unit	15 unit	117,370,000	UPK BA
			16 Pengendalian Hama (Pest Control) Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Frekuensi pengendalian hama (Pest Control)	-	4 kali	51,392,000	Subbag Umum
			17 Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Jumlah APAR yang diisi	16 tabung	18 tabung	12,966,228	UPT LLHD
			18 BPJS Kesehatan untuk Pemulung TPST Bantargebang	Jumlah pemulung	-	6.000 orang	2,019,600,000	UPST
			19 BPJS Ketenagakerjaan untuk Pemulung TPST Bantargebang	Jumlah pemulung	3.800 orang	6.000 orang	1,330,560,000	UPST
			20 Sewa Rumah Dinas di Kepulauan Seribu	Jangka waktu sewa	12 bulan	12 bulan	79,200,000	Sudin Kep. Seribu
			21 Tes Narkoba Pekerja Kontrak Perorangan	Jumlah orang yang mengikuti tes narkoba	-	1.100 orang	169,400,000	Bid. PK, UPST
			22 Jasa Jalan Tol	Jumlah kendaraan	7 unit	7 unit	12,196,800	UPST
			23 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang dilakukan pemeliharaan	23 jenis	15 jenis	1,559,719,982	Dinas, Sudin, UPST
			24 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	25 jenis	30 jenis	4,696,435,149	Sudin, UPT LLHD, UPST
			25 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pendingin (AC)	Jumlah AC yang diadakan dan dilakukan pemeliharaan	37 unit	79 unit	284,038,029	Subbag Umum, UPT LLHD
			26 Pengadaan dan Pemeliharaan Instalasi Listrik TPST Bantargebang	Jumlah instalasi listrik TPST Bantargebang	-	18 unit	199,646,315	UPST
			27 Pengadaan Handy Talkie	Jumlah pengadaan Handy Talkie	-	13 unit	94,380,000	UPST
			28 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	-	40 buah	13,310,000	UPST

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	
			29 Pengadaan Peralatan Safety Pekerja Instalasi Listrik	Jenis pengadaan peralatan safety pekerja instalasi listrik	-	6 jenis	101,032,109	UPST
			30 Pengadaan Perlengkapan Pendukung Command Center Lingkungan Hdup	Jumlah perlengkapan pendukung yang disediakan	-	6 jenis	149,014,800	Bid. TLK
			31 Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang dan Bengkel	Jenis pengadaan prasarana dan sarana gudang dan bengkel	-	3 jenis	167,942,570	Sudin Pusat
			32 Pengadaan Radio Rig	Jumlah radio Rig yang diadakan	-	10 unit	56,911,140	Bid. Prasar
			33 Pengadaan Repeater HT	Jumlah Repeater HT yang diadakan	-	7 buah	195,854,670	Bid. Prasar
			34 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Pengawasan	Jenis pengadaan sarana dan prasarana kerja pengawasan	-	5 jenis	154,990,000	Bid. Prasar
			35 Pengadaan Vertical Blind	Jumlah Vertical Blind yang diadakan	-	385 m ²	197,520,400	Sudin Pusat
			36 Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Jumlah APAR yang dilakukan pengisian	21 Buah	21 Buah	16,971,680	Sudin Timur
			37 Penyediaan Aplikasi Berbasis Web dan Android	Jumlah Aplikasi Berbasis Web dan Android yang disediakan	-	1 aplikasi	711,052,250	Sudin Timur
			38 Penyediaan belanja pulsa internet untuk GPS KDO/KDO Khusus	Jumlah KDO/KDOK yang diperpanjang pulsa GPS	-	259 unit	142,450,000	Sudin Selatan
			39 Perpanjangan Paket Pulsa GPS Tracker Truk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah KDO/KDOK yang diperpanjang pulsa GPS	1.363 unit	1.391 Unit	765,050,000	Dinas
			40 Sewa Kapal	Jumlah kapal	-	25 unit	532,537,500	Sudin Kep. Seribu
			41 Pengadaan Mebeulair Kantor Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jenis pengadaan mebeulair	-	35 jenis	2,740,976,641	Sudin Pusat
			42 Pengadaan PC	Jumlah pengadaan PC	-	9 unit'	144,292,500	UPST
			43 Pengadaan Laptop	Jumlah pengadaan laptop	-	3 unit	54,450,000	UPST
			44 Pengadaan Drone	Jumlah pengadaan drone	-	4 unit	136,400,000	Bid. Prasar, UPST
			45 Pengadaan CCTV, Tiang, Power dan Jaringan	Jumlah pengadaan CCTV, tiang, power dan jaringan	-	10 unit	176,386,540	UPST
			46 Pengadaan Printer	Jumlah pengadaan printer	-	17 unit	56,567,500	UPST
			47 Pengadaan APAR	Jumlah pengadaan APAR	-	6 buah	44,748,000	UPST
			48 Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis pengadaan peralatan kantor	10 jenis	22 jenis	1,192,527,468	UPK BA
			49 Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis pengadaan perlengkapan kantor	1 jenis	11 jenis	759,878,625	UPK BA

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	
			50 Pemeliharaan Gedung Kantor	Lokasi pemeliharaan gedung kantor	4 lokasi	12 lokasi	4,532,869,724	Subbag Umum, Sudin Pusat, Utara, Barat, Timur & UPST
			51 Pemeliharaan Gedung, Jaringan Listrik dan Komunikasi	Lokasi pemeliharaan gedung, jaringan listrik dan komunikasi	-	1 lokasi	253,294,574	UPT LLHD
			52 Pemeliharaan Genset	Jumlah genset yang dilakukan pemeliharaan	1 unit	1 unit	24,855,600	UPT LLHD
			53 Pemeliharaan Mesin Pompa Air dan Genset	Jumlah pemeliharaan mesin pompa air dan genset	2 Unit	2 Unit	31,900,000	Sudin Utara
			54 Pemeliharaan Taman Kantor	Lokasi pemeliharaan taman kantor	2 lokasi	2 lokasi	146,353,248	Subbag. Umum, UPT LLHD
			55 Pengerasan dan Peningkatan Jalan dan Areal Parkir Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Luasan area pengerasan dan peningkatan jalan dan areal parkir kantor Dinas Lingkungan Hidup	-	1.950 m ²	1,336,782,726	Subbag Umum
			56 Penguatan Landasan/Lokasi Parkir Alat Berat	Luasan area penguatan landasan parkir alat berat	-	6.877 m ²	4,643,556,978	UPST
			57 Rehab / Perawatan Asrama Dinas Lingkungan Hidup (Pagar Pembatas dan Gapura)	Jumlah lokasi perawatan asrama	-	1 lokasi	1,909,023,145	Subbag Umum
			58 Rehab / Perawatan Masjid Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi perawatan masjid	-	1 lokasi	127,550,019	Subbag Umum
			59 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah IPAL yang dibangun	-	1 instalasi	1,886,461,340	Subbag Umum
			60 Pembangunan Pagar	Jumlah lokasi pembangunan pagar	-	3 lokasi	2,661,493,982	Sudin Pusat, UPST
			61 Pembangunan Pos Jaga Keamanan	Lokasi pembangunan pos jaga keamanan	-	7 lokasi	192,983,583	UPST
			62 Pembuatan Sumur Dalam (Pantek) Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah sumur dalam (pantek)	-	4 titik	99,567,518	Subbag. Umum
			63 Pembuatan Sumur Resapan Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah sumur resapan	-	5 titik	51,567,841	Subbag. Umum
			64 Pengadaan Direksi Keet Mobile	Jumlah pengadaan Direksi Keet Mobile	-	2 unit	196,020,000	UPST
			65 Pengadaan Generator Set (Genset)	Jumlah pengadaan generator set (genset)	-	1 unit	513,928,800	Bid. Prasar
			66 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan, Lampu Taman, Lampu Sorot, serta Peralatan dan Perlengkapan Jaringan Listrik TPST Bantargebang	Jumlah titik pengadaan lampu	-	86 titik	2,797,176,648	UPST
			67 Rehab Total Workshop/Hanggar TPST Bantargebang	Jumlah lokasi rehab hanggar TPST Bantargebang	-	1 lokasi	1,997,995,515	UPST

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB			
						Target	Rp				
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan kendaraan operasional	Peningkatan kinerja pengelolaan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup	1	11	04	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup			4	225,193,195,642	Dinas, Sudin, UPST, UPT LLHD	
					1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan angkutan sampah yang dilakukan pemeliharaan	889 unit	928 unit	45,430,739,666	Sudin Utara, Selatan, Kep. Seribu, UPST
					2	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Perkantoran (ATPM)	Jumlah kendaraan operasional perkantoran yang dilakukan pemeliharaan	178 unit	185 unit	4,194,407,372	Bid. Prasar, Sudin Pusat, Timur, UPT LLHD
					3	Pemeliharaan Sepeda Motor Dinas Operasional Melalui ATPM	Jumlah sepeda motor yang dilakukan pemeliharaan	73 unit	75 unit	133,732,500	Bid. Prasar, Sudin Pusat
					4	Pemeliharaan Wheel Loader	Jumlah wheel loader yang dilakukan pemeliharaan	11 unit	15 unit	1,658,022,641	Sudin Utara
					5	Pemeliharaan Kapal Operasional	Jumlah kapal yang dilakukan pemeliharaan	-	6 unit	1,416,841,800	Sudin Kep. Seribu
					6	Pengadaan Suku Cadang Kapal	Jenis pengadaan suku cadang kapal	-	7 jenis	466,600,552	Sudin Kep. Seribu
					7	Penyediaan BBM	Jumlah volume penyediaan BBM	12.605.304 L	14.453.933 L	124,570,464,420	Sudin Pusat, Utara, Barat, Kep. Seribu, UPT LLHD, UPST
					8	Penyediaan Jasa Tol	Jumlah kendaraan	-	19 unit	84,004,800	Sudin Kep. Seribu
					9	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	Jumlah kendaraan yang diperpanjang jizinnya	2.728 unit	2.658 unit	4,780,157,860	Bid. Prasar, UPT LLHD, UPST
					10	Biaya Surat Kelengkapan Kapal	Jumlah kapal yang dilengkapi surat-suratnya	-	13 unit	26,000,000	Sudin Kep. Seribu
					11	Asuransi Alat Berat	Jumlah alat berat yang diasuransikan	-	51 unit	1,307,217,357	UPST
					12	Pembayaran Klaim Asuransi Alat Berat	Jumlah alat berat yang dibayarkan klaim asuransinya	-	3 unit	198,000,000	UPST
					13	Pengadaan Ban KDO / KDO Khusus	Jumlah pengadaan ban KDO / KDO Khusus	9.356 unit	10.804 unit	19,829,605,906	Sudin Utara, Selatan
					14	Pengadaan Accu KDO / KDO Khusus	Jumlah pengadaan accu KDO / KDO Khusus	1.618 unit	1.513 unit	1,885,302,733	Sudin Utara, Selatan
					15	Pengadaan Forklift	Jumlah pengadaan forklift	-	2 unit	2,966,150,000	Bid. Prasar
					16	Pengadaan Kapal Operasional Lingkungan Hidup	Jumlah pengadaan kapal operasional lingkungan hidup	-	1 unit	7,623,000,000	Bid. Prasar
					17	Pengadaan Mobil Derek	Jumlah pengadaan mobil derek	-	2 unit	3,047,000,000	Bid. Prasar
			18	Pengadaan Self Loader	Jumlah pengadaan self loader	-	1 unit	1,354,470,150	Bid. Prasar		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	DATA CAPAIAN TAHUN 2017	2018		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	
			19 Pengadaan Sepeda Motor Operasional	Jumlah pengadaan sepeda motor operasional	-	100 unit	2,915,000,000	Bid. Prasar
			20 Pengadaan Sepeda Patroli	Jumlah pengadaan sepeda patroli	-	100 unit	330,000,000	Bid. Prasar
			21 Pengadaan Radio Trunking	Jumlah pengadaan radio trunking	-	15 unit	106,414,000	Bid. Prasar
			22 Sewa Dermaga	Jumlah sewa dermaga	-	13 lokasi	858,000,000	Sudin Kep. Seribu
			23 Pelayanan Toilet Berjalan untuk Event-event Insidental	Jumlah event	-	200 event	12,063,885	Sudin Pusat

**TABEL 6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	2019		2020		2021		2022		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan penanganan dan pengurangan sampah	Peningkatan kinerja dan cakupan pelayanan sampah	1 11 01	Program Pengelolaan Persampahan	Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA	17%	1,623,813,602,333	20%	1,683,731,028,113	23%	3,119,742,137,393	26%	3,172,488,347,940	
			1 Pembuatan Peraturan Pembatasan Penggunaan Plastik dan Styrofoam	Jumlah pergub/perda yang disusun	1 pergub/perda	500,000,000	-	-	-	-	-	-	Bid. PK
			2 Pengawasan Pembatasan Penggunaan Plastik dan Styrofoam	Jumlah retail yang melaksanakan pembatasan penggunaan plastik dan styrofoam	60 titik	300,000,000	60 titik	321,000,000	60 titik	343,470,000	60 titik	367,512,900	Sudin
			3 Pemantauan Kinerja Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta	Jumlah aspek yang dipantau	5 aspek	73,027,500	5 aspek	78,139,425	5 aspek	83,609,185	5 aspek	89,461,828	Bid. PK
			4 Penanganan kebersihan dengan pekerja kontrak perorangan	Jumlah orang yang menangani kebersihan dengan kontrak perorangan	12.464 orang	958,834,928,701	12.464 orang	1,025,953,373,710	12.464 orang	1,097,770,109,870	12.464 orang	1,174,614,017,561	Bid. PK, Sudin UPT
			5 Peningkatan pengolahan sampah di TPS	Jumlah TPS yang ditingkatkan pengolahannya (menjadi TPS 3R)	20 unit	1,800,000,000	20 unit	1,926,000,000	20 unit	2,060,820,000	20 unit	2,205,077,400	Sudin
			6 Peningkatan TPS	Jumlah TPS yang ditingkatkan sehingga dapat menjadi TPS 3R	10 unit	10,000,000,000	10 unit	10,700,000,000	10 unit	11,449,000,000	10 unit	12,250,430,000	Sudin
			7 Pemeliharaan TPS	Jumlah TPS yang dilakukan pemeliharaan	10 unit	5,000,000,000	10 unit	5,350,000,000	10 unit	5,724,500,000	10 unit	6,125,215,000	Sudin
			8 Pemeliharaan Alat Pemusnah Sampah	Jumlah alat pemusnah sampah yang dilakukan pemeliharaan	16 unit	1,094,345,476	16 unit	1,170,949,659	16 unit	1,252,916,135	16 unit	1,340,620,265	P1000
			9 Pembinaan dan pengembangan Bank Sampah	Jumlah bank sampah yang terbentuk	200 bank sampah	100,000,000	200 bank sampah	107,000,000	200 bank sampah	114,490,000	200 bank sampah	122,504,300	Bid. PSM
			10 Pengembangan dan pendampingan Bank Sampah	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1.000 bank sampah	1,100,000,000	1.000 bank sampah	1,177,000,000	1.000 bank sampah	1,259,390,000	1.000 bank sampah	1,347,547,300	Sudin
			11 Penyediaan Prasarana dan Sarana Bank Sampah	Jumlah prasarana dan sarana bank sampah yang disediakan	5 jenis	1,343,493,194	5 jenis	1,437,537,718	5 jenis	1,538,165,358	5 jenis	1,645,836,933	Sudin
			12 Pengembangan Aplikasi e-Bank Sampah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1 aplikasi	30,000,000	1 aplikasi	32,100,000	1 aplikasi	34,347,000	1 aplikasi	36,751,290	Bid. PSM
			13 Pengadaan sarana dan prasarana komposting	Jumlah masyarakat/komunitas yang mendapat sarana prasarana komposting	50 orang	900,000,000	50 orang	963,000,000	50 orang	1,030,410,000	50 orang	1,102,538,700	Sudin
			14 Pelaksanaan Program Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah yang melaksanakan program adiwiyata	73 sekolah	1,130,489,525	87 sekolah	1,209,623,791	76 sekolah	1,294,297,457	75 sekolah	1,384,898,279	Bid. PSM, Sudin
			15 Penilaian Program Adipura	Jumlah Kota/kabupaten yang masuk Penilaian Program Adipura	6 wilayah	100,000,000	6 wilayah	107,000,000	6 wilayah	114,490,000	6 wilayah	122,504,300	Bid. PSM
			16 Pengelolaan Lingkungan Bersih, Hijau dan Sehat	Jumlah Kota/kabupaten yang masuk Penilaian Program Adipura	6 wilayah	600,000,000	6 wilayah	642,000,000	6 wilayah	686,940,000	6 wilayah	735,025,800	Sudin
			17 Pemberdayaan Usaha dan Produk Daur Ulang Ramah Lingkungan	Jumlah kegiatan pameran produk daur ulang ramah lingkungan	2 kegiatan	802,962,283	2 kegiatan	859,169,643	2 kegiatan	919,311,518	2 kegiatan	983,663,324	Bid. PSM
			18 Penerapan Teknologi Pengelolaan Lingkungan	Jenis teknologi yang diterapkan	3 jenis	245,727,178	3 jenis	262,928,080	3 jenis	281,333,046	3 jenis	301,026,359	Bid. PSM
			19 Pembangunan Model Pengelolaan Lingkungan	Jumlah model pengelolaan lingkungan yang di bangun	1 unit	653,594,781	1 unit	699,346,416	1 unit	748,300,665	1 unit	800,681,711	Bid. PSM
			20 Penguatan Peran Dunia Usaha dalam Program EPR/CSR Lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi penguatan peran dunia usaha dalam program EPR/CSR	100 orang	200,000,000	100 orang	214,000,000	100 orang	228,980,000	100 orang	245,008,600	Bid. PSM

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	2019		2020		2021		2022		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			21 Sosialisasi pengurangan sampah dunia usaha/pengelola kawasan	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	50,000,000	100 orang	53,500,000	100 orang	57,245,000	100 orang	61,252,150	Bid. PSM
			22 Monitoring pengurangan sampah dunia usaha/pengelola kawasan	Persentase kenaikan pengurangan sampah oleh dunia usaha/ pengelola kawasan	2%	50,000,000	3%	53,500,000	4%	57,245,000	5%	61,252,150	Bid. PK
			23 Kampanye No Food Waste	Jumlah peserta sosialisasi Kampanye No Food Waste	200 orang	200,000,000	200 orang	214,000,000	5 wilayah	228,980,000	5 wilayah	245,008,600	Dinas
			24 Pengadaan Alat Biopori dan kelengkapannya	Jumlah pengadaan alat biopori	1.100 buah	602,689,159	5 wilayah	644,877,400	5 wilayah	690,018,818	5 wilayah	738,320,135	Sudin
			25 Monitoring dan evaluasi Lubang Resapan Biopori	Persentase lubang resapan biopori yang berfungsi dimasyarakat	60%	100,000,000	70%	107,000,000	80%	114,490,000	90%	122,504,300	Sudin
			26 Pendampingan Pemilihan Badan Usaha dan <i>Financial Closing</i>	Jumlah dokumen financial closing pembangunan ITF	1 dokumen	3,000,000,000	-	-	-	-	-	-	UPST
			27 Pembayaran Tipping fee pengelolaan ITF	Jumlah ITF yang beroperasi	-	-	-	-	4 ITF	1,441,750,000,000	4 ITF	1,441,750,000,000	UPST
			28 Pengadaan Tong Sampah Pilah	Jumlah pengadaan tong sampah pilah	2.500 unit	7,680,513,500	2.500 unit	8,218,149,445	2.500 unit	8,793,419,906	2.500 unit	9,408,959,300	Sudin
			29 Pengadaan Angkutan sampah	Penyediaan alat angkutan sampah	703 unit	250,513,900,000	702 unit	233,955,198,565	575 unit	137,854,080,155	550 unit	147,503,865,766	Bid. Prasar, UPT
			30 Pengadaan Alat Berat	Jumlah alat berat yang tersedia	73 unit	205,241,133,312	58 unit	170,022,546,618	73 unit	222,202,239,160	58 unit	188,835,929,876	Bid. Prasar, UPT
			31 Pengadaan Penunjang Penanganan Sampah	Jumlah pengadaan alat penunjang penanganan sampah	74.102 unit	25,122,004,189	74.102 unit	26,852,578,467	74.102 unit	28,704,292,945	74.102 unit	29,947,917,734	Bid. Prasar, Sudin, UPT
			32 Pengadaan Tong Sampah Beroda (Dust Bin)	Jumlah pengadaan tong sampah beroda (dust bin)	2.000 unit	9,545,800,000	2.000 unit	10,214,006,000	2.000 unit	10,928,986,420	2.000 unit	11,694,015,469	Bid. Prasar
			33 Pengadaan Penyekat Sampah	Jumlah pengadaan penyekat sampah	6.388 buah	23,777,812,850	6.388 buah	25,442,259,750	6.388 buah	27,223,217,932	6.388 buah	29,128,843,187	UPK BA
			34 Pengadaan Ponton Sampah Sungai/Kali	Jumlah Pengadaan Ponton Sampah Sungai/Kali	20 unit	3,692,484,400	20 unit	3,950,958,308	20 unit	4,227,525,390	20 unit	4,523,452,167	UPK BA
			35 Pengadaan Perahu Karet	Jumlah Pengadaan Perahu Karet	20 unit	635,580,000	20 unit	680,070,600	20 unit	727,675,542	20 unit	778,612,830	UPK BA
			36 Pengadaan Pos Mobile	Jumlah Pengadaan Pos Mobile	42 unit	2,307,155,400	42 unit	2,468,656,278	42 unit	2,641,462,217	42 unit	2,826,364,573	UPK BA
			37 Pemeliharaan Saringan Sampah	Jumlah saringan sampah yang dipelihara	23 lokasi	2,613,163,309	23 lokasi	2,796,084,741	23 lokasi	2,991,810,672	23 lokasi	3,201,237,420	UPK BA
			38 Pemeliharaan Jalan Operasional TPST Bantargebang	Luas jalan operasional TPST Bantargebang yang dilakukan pemeliharaan	6957 m ² (tebal 33 cm)	35,755,965,300	6957 m ² (tebal 33 cm)	38,258,882,871	6957 m ² (tebal 33 cm)	40,937,004,672	6957 m ² (tebal 33 cm)	43,802,594,999	UPST
			39 Pemeliharaan Jembatan dan Gorong-gorong di Areal TPST Bantargebang	Luas jembatan dan gorong-gorong yang dilakukan pemeliharaan	200 m	1,447,710,000	200 m	1,549,049,700	200 m	1,657,483,179	200 m	1,773,507,002	UPST
			40 Pemeliharaan Car Washing	Jumlah car wash yang dilakukan pemeliharaan	1 unit	218,740,742	1 unit	234,052,594	1 unit	250,436,276	1 unit	267,966,815	UPST
			41 Pemeliharaan Drainase TPST Bantargebang	Jumlah u-ditch yang dilakukan pemeliharaan	5.647 unit	5,352,894,852	5.647 unit	5,727,597,491	5.647 unit	6,128,529,316	5.647 unit	6,557,526,368	UPST
			42 Covering Landfill	Luasan area covering landfill	18.430 m ² Geo-membran	16,720,288,855	18.430 m ² Geo-membran	17,890,709,075	18.430 m ² Geo-membran	19,143,058,710	18.430 m ² Geo-membran	20,483,072,819	UPST
			43 Pengolahan Kompos TPST Bantargebang	Volume hasil pengolahan kompos TPST Bantargebang	1 Paket	532,858,286	1 Paket	570,158,366	1 Paket	610,069,451	1 Paket	652,774,313	UPST
			44 Pemeliharaan Jembatan Timbang	Jumlah jembatan timbang yang dilakukan pemeliharaan	2 unit	121,945,827	2 unit	130,482,035	2 unit	139,615,778	2 unit	149,388,882	UPST
			45 Jasa Pendampingan Pengelolaan Sampah	Jumlah tenaga ahli pendampingan pengelolaan sampah	148 orang	3,031,590,787	148 orang	3,243,802,142	148 orang	3,470,868,292	148 orang	3,713,829,073	UPST
			46 Penyusunan DED Landfill Miring	Dokumen DED	1 dokumen	1,900,000,000	-	-	-	-	-	-	UPST
			47 Pembangunan sorting plant	Jumlah sorting plant yang dibangun	-	-	1 lokasi	36,000,000,000	-	-	-	-	UPST
			48 Operasional Landfill mining	Luasan area landfill mining	-	-	-	-	4,5 Ha	-	5 Ha	-	UPST

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	2019		2020		2021		2022		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			49 Pengolahan Air Sampah TPST Bantargebang (IPAS)	Volume pengolahan air sampah TPST Bantargebang (IPAS)	575 m3	184,641,875	575 m3	197,566,806	575 m3	211,396,483	575 m3	226,194,236	UPST
			50 Pembangunan Jembatan Timbang dan Pos	Jumlah jembatan timbang dan pos yang dibangun	-	-	1 Paket	3,000,000,000	-	-	-	-	UPST
			51 Pembangunan Jalan di Atas Zona TPST Bantargebang	Luas jalan yang dibangun	2.200 m ²	4,128,753,244	2.200 m ²	4,417,765,972	-	-	-	-	UPST
			52 Pembangunan Dinding Penahan di TPST Bantargebang	Panjang dinding penahan yang dibangun	477,5 m	10,705,403,167	-	-	-	-	-	-	UPST
			53 Pembangunan IPAS	Jumlah IPAS yang dibangun	-	-	1 lokasi	-	-	-	-	-	UPST
			54 Pembangunan Jaringan Hydrant	Jumlah jaringan hydrant yang dibangun	-	-	1 Paket	5,000,000,000	1 Paket	5,000,000,000	1 Paket	5,000,000,000	UPST
			55 Penyusunan DED Daur Ulang Plastik	Dokumen DED	-	-	1 dokumen	500,000,000	-	-	-	-	UPST
			56 Pembangunan Daur Ulang Plastik	Jumlah unit daur ulang plastik yang dibangun	-	-	-	-	1 Unit	7,000,000,000	-	-	UPST
			57 Perencanaan fasilitas pengolahan sampah berbasis biologi	Dokumen perencanaan teknis pengolahan sampah secara biologi	1 dokumen	500,000,000	-	-	-	-	-	-	UPST
			58 Pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis biologi	Jumlah fasilitas pengolahan sampah berbasis biologi yang dibangun	-	-	1 Paket	10,000,000,000	-	-	-	-	UPST
			59 Pembangunan Gedung Pusat Studi Sampah Nasional	Jumlah Gedung Pusat Studi Sampah Nasional yang dibangun	1 Paket	15,000,000,000	-	-	-	5,000,000,000	-	-	UPST
			60 Optimalisasi IPAS 1	Jumlah IPAS yang ditingkatkan	-	-	1 Paket	5,000,000,000	1 Paket	2,000,000,000	1 Paket	2,000,000,000	UPST
			61 Optimalisasi IPAS 3	Jumlah IPAS yang ditingkatkan	-	-	1 Paket	5,000,000,000	1 Paket	2,000,000,000	1 Paket	2,000,000,000	UPST
			62 Pengolahan Gas Methane TPST Bantargebang	Volume gas methane yang diolah	1 Zona	1,987,000,000	1 Zona	2,126,090,000	1 Zona	2,274,916,300	1 Zona	2,434,160,441	UPST
			63 Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kecamatan dan Sarana Penuniananva	Jumlah TPS Limbah B3 Skala Kota yang dibangun	5 unit	1,257,605,968	5 unit	1,345,638,385	5 unit	1,439,833,072	5 unit	1,540,621,387	Bid. PK
			64 Jasa Pengolahan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga	Volume Pengolahan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga	10.000 kg padat; 2.000 L liquid	530,000,000	10.000 kg padat; 2.000 L liquid	567,100,000	10.000 kg padat; 2.000 L liquid	606,797,000	10.000 kg padat; 2.000 L	649,272,790	Bid. PK
			65 Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes Tk. Dasar, USK dan Rumah Tangga	Jumlah Kebijakan Teknis Pengelolaan limbah B3 dari Fasyankes Tk. Dasar, USK dan Rumah Tangga yang disusun	3 dokumen	750,000,000	-	-	-	-	-	-	Bid. PK
			66 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes Tk Dasar, USK dan Rumah Tangga	Jumlah Fasyankes Tk. Dasar/USK/ Rumah Tangga yang dibina dan diawasi	100 Fasyankes Dasar/USK/ Rumah Tangga	600,000,000	100 Fasyankes Dasar/USK/ Rumah Tangga	642,000,000	100 Fasyankes Dasar/USK/ Rumah Tangga	686,940,000	100 Fasyankes Dasar/USK/ Rumah Tangga	735,025,800	Bid. PK, Sudin
			67 Pengadaan Alat Angkut Limbah B3 Truk Box	Jumlah truk box Limbah B3 yang tersedia	-	-	-	-	5 unit	1,455,231,148	-	-	Bid. Prasar
			68 Pengadaan Drop Box e-Waste	Jumlah drop Box e-waste yang tersedia	-	-	30 unit	79,860,000	-	-	-	-	Bid. Prasar
			69 Pengawasan pelaksanaan kebijakan Bid. lingkungan hidup (Limbah B3)	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi penanganan limbah B3-nva	630 kegiatan usaha	3,012,398,674	765 kegiatan usaha	3,222,268,061	860 kegiatan usaha	3,447,826,826	930 kegiatan usaha	3,689,174,704	Bid. PPH, Sudin
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air dan Udara	1 11 02	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	37.14	31,115,741,628	37.51	44,157,440,778	37.89	45,108,162,599	38.27	37,292,026,795	Dinas, Sudin, UPT LLHD
			1 Penilaian dokumen lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	80 dokumen	564,960,000	80 dokumen	604,507,200	80 dokumen	646,822,704	80 dokumen	692,100,293	Bid. PDL
			2 Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah	Jumlah titik pemantauan kualitas air tanah	267 titik	446,953,980	267 titik	478,240,759	267 titik	511,717,612	267 titik	547,537,845	Bid. PDL

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	2019		2020		2021		2022		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			3 Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Sungai	Jumlah titik pemantauan kualitas air sungai	90 titik	379,582,500	90 titik	406,153,275	90 titik	434,584,004	90 titik	465,004,885	Bid. PDL
			4 Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Situ/Waduk	Jumlah titik pemantauan kualitas air situ/waduk	40 situ/waduk	272,240,100	40 situ/waduk	291,296,907	40 situ/waduk	311,687,690	40 situ/waduk	333,505,829	Bid. PDL
			5 Pemantauan Kualitas Lingkungan Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta	Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan perairan laut dan muara Teluk Jakarta	45 titik	460,287,717	45 titik	492,507,857	45 titik	526,983,407	45 titik	563,872,245	Bid. PDL
			6 Pemantauan Kualitas Lingkungan disekitar TPS di DKI Jakarta	Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan disekitar TPST Bantar Gebang dan TPS di DKI Jakarta	25 titik	250,030,378	25 titik	267,532,504	25 titik	286,259,779	25 titik	306,297,964	Bid. PDL
			7 Penyusunan Bahan Kebijakan Pembinaan Terhadap Usaha Skala Kecil	Jumlah usaha skala kecil yang disusun kebijakannya	1 dokumen	63,344,000	1 dokumen	67,778,080	1 dokumen	72,522,546	1 dokumen	77,599,124	Bid. PDL
			8 Inventarisasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan	Jumlah lokasi pelaksanaan Inventarisasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan	6 titik	575,000,000	6 titik	614,251,480	6 titik	657,249,084	6 titik	703,256,520	Bid. PDL, Sudin
			9 Pemulihan Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	Jumlah lokasi yang dipulihkan	1 titik	500,000,000	1 titik	535,000,000	1 titik	572,450,000	1 titik	612,521,500	Bid. PDL
			10 Pengawasan pelaksanaan pengelolaan air limbah	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi	1.190 kegiatan usaha	324,573,318	1.295 kegiatan usaha	347,293,450	1.400 kegiatan usaha	371,603,992	1.480 kegiatan usaha	397,616,271	Bid. PPH, Sudin
			11 Pemeliharaan Prasarana Sarana Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan	Jumlah sarana prasarana yang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan yang dipelihara	6 unit	50,000,000	6 unit	50,000,000	6 unit	50,000,000	6 unit	50,000,000	Dinas
			12 Pengadaan Truk Tangki Air Kotor Kecil	Jumlah truk tangki air kotor kecil yang disediakan	-	-	-	-	9 unit	4,533,303,375	-	-	Bid. Prasar
			13 Pengadaan Truk Tangki Air Bersih	Jumlah truk tangki air bersih yang disediakan	-	-	-	-	7 unit	3,525,902,625	-	-	Bid. Prasar
			14 Pengadaan Truk Tangki Penyedot Air Leachate dari TPS	Jumlah truk tangki penyedot air leachate yang disediakan	-	-	-	-	7 unit	3,525,902,625	-	-	Bid. Prasar
			15 Pengadaan Bahan Kimia dan Standard Reference Material (SRM)	Tersedianya bahan kimia dan Standard Reference Material (SRM)	120 jenis	1,700,000,000	120 jenis	1,700,000,000	120 jenis	1,800,000,000	120 jenis	1,800,000,000	LLHD
			16 Pengadaan Suku Cadang Peralatan Laboratorium	Tersedianya suku cadang peralatan laboratorium	10 alat	1,000,000,000	10 alat	1,000,000,000	10 alat	1,000,000,000	10 alat	1,000,000,000	LLHD
			17 Pengadaan Peralatan Laboratorium	Tersedianya peralatan laboratorium	4 jenis	4,069,398,359	4 jenis	4,354,256,244	4 jenis	4,659,054,181	4 jenis	4,985,187,973	LLHD
			18 Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium	Terlaksananya Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium	20 jenis	401,531,196	20 jenis	429,638,380	20 jenis	459,713,066	20 jenis	491,892,981	LLHD
			16 Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta	Jumlah laporan	2 dokumen	637,980,000	2 dokumen	682,638,600	2 dokumen	730,423,302	2 dokumen	781,552,933	Bid. TLK
			20 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah sektor yang di monitor dan evaluasi	6 sektor	286,440,000	6 sektor	306,490,800	6 sektor	327,945,156	6 sektor	350,901,317	Bid. TLK
			21 Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim)	Meningkatnya Jumlah RW yang mengikuti Program Kampung Iklim	27 RW	138,960,237	27 RW	148,687,453	27 RW	159,095,575	27 RW	170,232,265	Bid. PSM, Sudin
			22 Pemantauan Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan	Jumlah titik pemantauan	25 titik, 2 periode	87,633,000	25 titik, 2 periode	93,767,310	25 titik, 2 periode	100,331,022	25 titik, 2 periode	107,354,193	Bid. PDL
			23 Pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	Jumlah titik pemantauan per wilayah	5 titik	1,241,525,237	5 titik	1,328,432,004	5 titik	1,421,422,244	5 titik	1,520,921,801	Sudin
			24 Pemantauan Kualitas Lingkungan Udara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB)	Jumlah titik pemantauan per wilayah	5 titik	572,803,528	5 titik	612,899,775	5 titik	655,802,759	5 titik	701,708,952	Sudin

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	2019		2020		2021		2022		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			25 Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	20.000 kendaraan (Dinas); 2.000 (per sudin)	1,033,815,163	20.000 kendaraan (Dinas); 2.000 (per sudin)	1,106,182,224	20.000 kendaraan (Dinas); 2.000 (per sudin)	1,183,614,980	20.000 kendaraan (Dinas); 2.000 (per sudin)	1,266,468,028	Bid. PDL, Sudin
			26 Pengawasan pengelolaan pencemaran udara sumber emisi tidak bergerak	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan pencemaran udara sumber emisi tidak bergerak	965 kegiatan usaha	725,804,808	1.045 kegiatan usaha	776,611,144	1.125 kegiatan usaha	830,973,924	1.180 kegiatan usaha	889,142,099	Bid. PPH, Sudin
			27 Pengadaan Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji emisi kendaraan bermotor yang disediakan	-	-	16 unit	1,256,001,536	-	-	16 unit	1,343,921,643	Bid. Prasar
			28 Pemeliharaan dan Perawatan Stasiun Pemantau Kualitas Udara di 5 Wilayah Kota Administrasi dan 1 SPKU bergerak	Jumlah SPKU yang dilakukan pemeliharaan	6 SPKU	450,000,000	8 SPKU	450,000,000	8 SPKU	450,000,000	9 SPKU	470,000,000	LLHD
			29 Pengadaan Suku Cadang Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU)	Jenis suku cadang stasiun pemantau kualitas udara	30 jenis	3,000,000,000	30 jenis	3,000,000,000	30 jenis	3,000,000,000	30 jenis	3,500,000,000	LLHD
			30 Pengadaan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU)	Jumlah pengadaan SPKU	-	-	1 unit	9,200,000,000	-	-	-	-	LLHD
			31 Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun	1 dokumen	250,000,000	-	-	-	-	-	-	Biid. TLK
			32 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (updating)	Jumlah komponen sumber daya alam yang dibuat dalam neraca	-	-	-	0	-	0	-	0	Biid. TLK
			33 Implementasi dan Monitoring Masterplan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Laporan implementasi dan monitoring Masterplan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 dokumen	247,705,000	1 dokumen	265,044,350	1 dokumen	283,597,455	1 dokumen	303,449,276	Biid. TLK
			34 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah dokumen DIKPLH yang disusun	1 dokumen	280,027,293	1 dokumen	299,629,203	1 dokumen	320,603,247	1 dokumen	343,045,474	Biid. TLK
			35 Penyusunan kebijakan peneraan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah draft kebijakan peneraan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun	4 draft kebijakan	248,454,000	2 draft kebijakan	500,000,000	4 draft kebijakan	284,454,985	4 draft kebijakan	304,366,834	Biid. TLK
			36 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Data IKLH	1 dokumen	310,002,540	1 dokumen	331,702,718	1 dokumen	354,921,908	1 dokumen	379,766,442	Biid. TLK
			37 Pemantauan dan evaluasi KLHS	Persentase KLHS yang dievaluasi	100%	311,102,500	100%	332,879,675	100%	356,181,252	100%	381,113,940	Biid. TLK
			38 Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disusun	1 dokumen	700,000,000	-	-	-	-	-	-	Biid. TLK
			39 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi yang dilakukan assesment dan diberikan rekomendasi pemanfaatan SDA	4 lokasi	349,000,000	4 lokasi	383,900,000	4 lokasi	422,290,000	4 lokasi	464,519,000	Biid. TLK
			40 Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta.	Dokumen yang disusun	Rencana Induk Pengelolaan Kehati	349,000,000	RAD Pengelolaan Kehati	383,900,000	Pemantauan dan pengawasan pengelolaan Kehati	422,290,000	Pengembangan SI dan database Kehati	464,519,000	Biid. TLK
			41 Pengembangan Teknologi Pengelolaan Lingkungan dan Kebersihan	Jumlah kajian pengelolaan lingkungan dan kebersihan yang dikembankan	1 kajian	250,000,000	1 kajian	2,000,000,000	1 kajian	286,225,000	1 kajian	306,260,750	Biid. TLK
			42 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan	Jenis Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan yang dikelola dan dikembankan	7 jenis	450,000,000	7 jenis	350,000,000	7 jenis	250,000,000	7 jenis	250,000,000	Biid. TLK

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	2019		2020		2021		2022		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			43 Monitoring dan pengawasan penerapan teknologi pengelolaan lingkungan dan kebersihan	Jumlah kegiatan penerapan teknologi pengelolaan lingkungan dan kebersihan yang dimonitor	3 kegiatan	50,000,000	3 kegiatan	53,500,000	3 kegiatan	57,245,000	3 kegiatan	61,252,150	Biid. TLK
			44 Pengelolaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian Terakreditasi	Jumlah dokumen akreditasi	5 dokumen	133,208,154	5 dokumen	142,532,725	5 dokumen	152,510,016	5 dokumen	163,185,717	UPT LLHD
			45 Pelayanan Toilet Berjalan untuk Penanganan Event-Event Insidental	Jumlah event yang dilayani	120 event	504,148,370	120 event	539,438,756	120 event	577,199,469	120 event	617,603,432	Bid. PK, Sudin
			46 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	Jumlah penerima penghargaan (Kalpataru, Lembaga, Forum Masyarakat, Saka Kalpataru)	15 Orang/komunitas	265,700,000	15 Orang/komunitas	284,299,000	15 Orang/komunitas	304,199,930	15 Orang/komunitas	325,493,925	Bid. PSM
			47 Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat	5 jenis	205,000,000	6 jenis	219,350,000	7 jenis	234,704,500	8 jenis	251,133,815	Bid. PSM
			48 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	10 kegiatan	600,000,000	10 kegiatan	642,000,000	10 kegiatan	686,940,000	10 kegiatan	735,025,800	Sudin
			49 Pembuatan Media Audio Visual Edukasi Lingkungan Hidup	Jumlah video sebagai media edukasi yang dibuat	5 video	476,363,690	5 video	509,709,148	5 video	545,388,788	5 video	583,566,004	Bid. PSM
			50 Penyediaan Sarana dan Prasarana Edukasi, Sosialisasi dan Bimbingan	Jenis sarana dan prasarana edukasi yang disediakan	11 jenis	607,760,000	11 jenis	650,303,200	11 jenis	695,824,424	11 jenis	744,532,134	Bid. PSM
			51 Informasi, Komunikasi dan Publikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Pameran Lingkungan dan Kebersihan)	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	2 Kegiatan	850,750,000	4 Kegiatan	910,302,500	6 Kegiatan	974,023,675	6 Kegiatan	1,042,205,332	Bid. PSM
			52 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari lingkungan hidup dan kebersihan	5 kegiatan	375,000,000	5 kegiatan	401,250,000	5 kegiatan	429,337,500	5 kegiatan	459,391,125	Bid. PSM
			53 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (dokumen lingkungan)	Persentase pengawasan terhadap implementasi dokumen lingkungan	40%	253,768,000	45%	271,531,760	50%	290,538,983	55%	310,876,712	Bid. PPH, Sudin
			54 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Jumlah kegiatan usaha yang mengikuti peringkat kinerja perusahaan (PROPER)	425	161,784,000	450	173,108,880	475	185,226,502	500	198,192,357	Bid. PPH
			55 Pengawasan dampak pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta terhadap Lingkungan	Terlaksananya Pengawasan dampak pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta terhadap Lingkungan	1 laporan	2,733,254,203	1 laporan	2,924,581,997	1 laporan	3,129,302,737	1 laporan	3,348,353,928	Bid. PPH
			56 Penanganan Pengaduan Pencemaran dan Sengketa Lingkungan	Persentase pengaduan pencemaran dan sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	209,715,977	100%	224,396,095	100%	240,103,822	100%	256,911,089	Bid. PPH
			57 Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	154,640,819	100%	165,465,676	100%	177,048,274	100%	189,441,653	Sudin
			58 Penegakan hukum lingkungan	Jumlah penegakan hukum lingkungan	1.450 sanksi	199,736,900	1.460 sanksi	213,718,483	1.470 sanksi	228,678,777	1.480 sanksi	244,686,291	Bid. PPH, Sudin
			59 Operasi Tangkap Tangan Pelanggaran Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah kegiatan Operasi Tangkap Tangan Pelanggaran Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.200 kegiatan	256,756,665	1.210 kegiatan	274,729,632	1.220 kegiatan	293,960,706	1.240 kegiatan	314,537,955	Bid. PPH
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan perkantoran	Peningkatan kinerja pengelolaan kantor Dinas Lingkungan Hidup	1 11 03	Peningkatan Pengelolaan Kantor	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	83,965,537,246	4	109,723,603,713	4	117,419,595,973	4	125,540,107,691	Dinas, Sudin, UPT
			1 Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Jumlah bulan pembayaran jasa TALI	12 bulan	23,298,524,617	12 bulan	24,929,421,340	12 bulan	26,674,480,834	12 bulan	28,541,694,492	Dinas, Sudin, UPT
			2 Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	182 orang	14,513,823,339	182 orang	15,529,790,973	182 orang	16,616,876,341	182 orang	17,780,057,685	Dinas, Sudin, UPT

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	2019		2020		2021		2022		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			3 Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	100 orang	6,412,762,485	100 orang	6,861,655,859	100 orang	7,341,971,769	100 orang	7,855,909,793	Dinas, Sudin, UPT
			4 Penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah pengadaan makan dan minum rapat	75.118 boks	3,408,697,128	75.118 boks	3,647,305,926	75.118 boks	3,902,617,341	75.118 boks	4,175,800,555	Dinas, Sudin, UPT
			5 Penyediaan alat tulis kantor	Jenis pengadaan alat tulis kantor	200 jenis	1,921,743,301	200 jenis	2,056,265,332	200 jenis	2,200,203,906	200 jenis	2,354,218,179	Dinas, Sudin, UPT
			6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	129 jenis	2,210,095,914	129 jenis	2,364,802,628	129 jenis	2,530,338,812	129 jenis	2,707,462,529	Dinas, Sudin, UPT
			7 Penyediaan sewa mesin foto copy	Jumlah mesin foto copy yang disewa	30 unit	1,650,972,439	30 unit	1,766,540,509	30 unit	1,890,198,345	30 unit	2,022,512,229	Dinas, Sudin, UPT
			8 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan materai	2.960 lembar	67,878,366	2.960 lembar	72,629,851	2.960 lembar	77,713,941	2.960 lembar	83,153,917	Sudin, UPT LLHD
			9 Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah	Volume air limbah	866 m ³	258,057,250	866 m ³	276,121,258	866 m ³	295,449,746	866 m ³	316,131,228	Dinas, Sudin
			10 Pengendalian Hama (Pest Control) Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Frekuensi pengendalian hama (Pest Control)	4 kali	54,989,440	4 kali	58,838,701	4 kali	62,957,410	4 kali	67,364,429	Dinas
			11 Peningkatan wawasan pengelolaan lingkungan dan kebersihan	Jumlah kegiatan peningkatan wawasan pengelolaan lingkungan dan kebersihan	2 kegiatan	50,000,000	2 kegiatan	50,000,000	2 kegiatan	50,000,000	2 kegiatan	50,000,000	Dinas
			12 Pengelolaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Frekuensi surveillance Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian Terakreditasi	2 kali	50,000,000	2 kali	50,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	50,000,000	Dinas
			13 Sewa Rumah Dinas di Kepulauan Seribu	Jangka waktu sewa	12 bulan	84,744,000	12 bulan	90,676,080	12 bulan	97,023,406	12 bulan	103,815,044	P 1000
			14 Sewa Dermaga	Jumlah sewa dermaga	13 lokasi	918,060,000	13 lokasi	982,324,200	13 lokasi	1,051,086,894	13 lokasi	1,124,662,977	P 1000
			15 Penyediaan Jasa Penerapan Jaminan Mutu Laboratorium	Jumlah tenaga penerapan jaminan mutu laboratorium	16 orang	1,029,919,794	16 orang	1,102,014,180	16 orang	1,179,155,173	16 orang	1,261,696,035	LLHD
			16 Penyediaan Ekstra Fooding	Jenis penyediaan ekstra fooding	3 jenis	120,416,163	3 jenis	128,845,294	3 jenis	137,864,465	3 jenis	147,514,977	LLHD
			17 Penanganan Limbah B3 dan Bahan Kimia Kadaluarsa	Jumlah limbah B3 yang ditangani di UPT LLLHD	2.745 L dan 200 kg	135,000,000	1 tahun	144,450,000	1 tahun	154,561,500	1 tahun	165,380,805	LLHD
			18 Pengolahan Air Limbah dan Pemeliharaan IPAL Laboratorium	Terlaksananya Pengolahan Air Limbah dan Pemeliharaan IPAL Laboratorium	1 unit	100,000,000	1 unit	110,000,000	1 unit	120,000,000	1 unit	120,000,000	LLHD
			19 BPJS untuk Pemulung TPST Bantargebang	Jumlah pemulung	6.000 orang	3,584,671,200	6.000 orang	3,835,598,184	6.000 orang	4,104,090,057	6.000 orang	4,391,376,361	UPST
			20 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang dilakukan pemeliharaan	771 unit	1,671,651,465	771 unit	1,788,667,068	771 unit	1,913,873,763	771 unit	2,047,844,926	Dinas, Sudin
			21 Pengisian Tabung Gas Peralatan Laboratorium	Jumlah tabung yang diisi	15 tabung (4 jenis)	34,333,090	15 tabung (4 jenis)	36,736,406	15 tabung (4 jenis)	39,307,955	15 tabung (4 jenis)	42,059,512	LLHD
			22 Pengadaan Prasarana dan Sarana Kerja	Jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	159 jenis	11,690,061,903	159 jenis	12,508,366,236	159 jenis	13,383,951,873	159 jenis	14,320,828,504	Dinas, Sudin, UPT
			23 Pengadaan Perlengkapan Pendukung Command Center Lingkungan Hidup	Jenis perlengkapan pendukung yang disediakan	6 jenis	159,445,836	6 jenis	170,607,045	6 jenis	182,549,538	6 jenis	195,328,005	Dinas
			24 Perpanjangan Paket Pulsa GPS Tracker KDO/KDO	Jumlah KDO/KDOK yang diperpanjang pulsa GPS	1.435 unit	895,697,000	1.435 unit	958,395,790	1.435 unit	1,025,483,495	1.435 unit	1,097,267,340	Bid. TLK, Sudin
			25 Penyediaan Aplikasi Berbasis Web dan Android	Jumlah aplikasi berbasis web dan android yang disediakan	1 sistem	794,475,000	1 sistem	850,088,250	1 sistem	909,594,428	1 sistem	973,266,037	Bid.PSM
			26 Sewa Kapal	Jumlah kapal	25 unit	569,815,125	25 unit	609,702,184	25 unit	652,381,337	25 unit	698,048,030	P 1000
			27 Pemeliharaan Gedung dan Sarana Prasarana Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan	11 kegiatan	5,412,415,318	11 kegiatan	25,690,743,250	11 kegiatan	27,474,115,278	11 kegiatan	29,382,323,347	Dinas, Sudin
			28 pemeliharaan Gedung dan Sarana Prasarana Gedung Kantor TPST	Jumlah kegiatan pemeliharaan	1 Paket	214,000,000	1 Paket	214,000,000	1 Paket	214,000,000	1 Paket	214,000,000	UPST
			29 Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Pompa Air dan Genset	Jumlah kegiatan	5 kegiatan	610,632,308	5 kegiatan	653,376,570	5 kegiatan	699,112,929	5 kegiatan	748,050,834	Dinas, Sudin

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	2019		2020		2021		2022		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			30 Pemeliharaan Sarana Prasarana Asrama Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Asrama Dinas Lingkungan Hidup	8 lokasi	2,042,654,765	8 lokasi	2,185,640,599	8 lokasi	2,338,635,441	8 lokasi	2,502,339,921	Dinas
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan kendaraan operasional	Peningkatan kinerja pengelolaan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup	1 11 04	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	524,139,223,674	4	560,583,969,331	4	599,579,847,184	4	641,305,436,487	Dinas, Sudin, UPT
			1 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Road Sweeper (ATPM)	Jumlah Road Sweeper yang dipelihara (ATPM)	15 unit	5,793,446,349	15 unit	6,198,987,593	15 unit	6,632,916,725	15 unit	7,097,220,895	Dinas, Sudin
			2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Bermotor Truck (ATPM)	Jumlah kendaraan truck yang dilakukan pemeliharaan	1.617 unit	82,446,357,849	1.617 unit	88,217,602,899	1.617 unit	94,392,835,101	1.617 unit	101,000,333,559	Dinas, Sudin
			3 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Perkantoran (ATPM)	Jumlah kendaraan operasional perkantoran yang dilakukan pemeliharaan	215 unit	3,764,615,328	215 unit	4,028,138,401	215 unit	4,310,108,089	215 unit	4,611,815,655	Dinas, Sudin, UPT
			4 Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor Dinas Operasional Melalui ATPM	Jumlah sepeda motor yang dilakukan pemeliharaan	100 unit	494,428,275	100 unit	529,038,254	100 unit	566,070,932	100 unit	605,695,897	Dinas, Sudin, UPT
			5 Pemeliharaan Gerobak Motor	Terlaksananya Pemeliharaan Gerobak Motor	100 unit	1,419,632,522	100 unit	1,519,006,798	100 unit	1,625,337,274	100 unit	1,739,110,883	Sudin
			6 Pemeliharaan Alat Berat Kebersihan	Jumlah alat berat yang dilakukan pemeliharaan		20,398,462,064		21,826,354,408		23,354,199,217		24,988,993,162	Bid. Prasar, Sudin, UPK BA, UPST
			7 Pengadaan Suku Cadang Kapal dan Pemeliharaan Kapal	Jumlah kapal yang dilakukan pemeliharaan	6 unit	2,015,283,317	6 unit	2,156,353,149	6 unit	2,307,297,869	6 unit	2,468,808,720	Sudin Kepulauan Seribu
			8 Penyediaan BBM KDO / KDO Khusus	Jumlah volume penyediaan BBM	14.453.933 L	287,600,273,140	14.453.933 L	307,732,292,260	14.453.933 L	329,273,552,718	14.453.933 L	352,322,701,408	Dinas, Sudin, UPT
			9 Penyediaan Jasa Jalan Tol	Jumlah kendaraan	2.315 unit	12,563,060,032	2.315 unit	13,442,474,234	2.315 unit	14,383,447,431	2.315 unit	15,390,288,751	Dinas, Sudin, UPT
			10 Penyediaan Jasa Asuransi dan Perijinan	Jumlah kendaraan yang diperpanjang ijinnya	2.812 unit	24,275,593,805	2.812 unit	25,974,885,372	2.812 unit	27,793,127,348	2.812 unit	29,738,646,262	Dinas, Sudin, UPT
			11 Pengadaan Ban KDO/KDO Khusus	Jumlah pengadaan ban KDO/KDOK	6 paket	60,642,867,595	6 paket	64,642,868,326	6 paket	68,922,869,109	6 paket	73,502,469,947	Sudin, UPST
			12 Pengadaan Accu KDO / KDO Khusus	Jumlah pengadaan accu KDO/KDO khusus	6 paket	3,096,566,839	6 paket	3,313,326,518	6 paket	3,545,259,374	6 paket	3,793,427,530	Sudin
			13 Pengadaan Sarana Penunjang Pelaksanaan Operasional	Jenis pengadaan sarana penunjang pelaksanaan operasional	10 jenis	19,628,636,561	10 jenis	21,002,641,120	10 jenis	22,472,825,998	10 jenis	24,045,923,818	Dinas